



Renstra

2025-2026

**DINAS
PETERNAKAN**





GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagai kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 akan berakhir pada Tahun 2024, maka perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa Diktum KETIGA dan Diktum KEENAM Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, pada dasarnya mengamanatkan Renstra Perangkat daerah provinsi tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah paling lambat Minggu Ketiga Bulan Januari Tahun 2024;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2026.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat Gubernur melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban gubernur dalam kurun waktu tertentu.
6. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 –2026 yang berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.

7. Rencana . . .

7. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Renstra PD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan:
 - a. Renja PD Tahun 2025 - 2026; dan
 - b. Rencana Kerja Anggaran PD Tahun Anggaran 2025 - 2026.
- (2) Penetapan Renstra PD mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, serta sebagai pengendalian dan evaluasi Renstra PD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.

(2) Renstra . . .

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Strategis:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
 - h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Dinas Perkebunan;
 - y. Dinas Peternakan;
 - z. Dinas Kehutanan;
 - aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - cc. Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - ee. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Timur;
 - ff. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - gg. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - hh. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
 - ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - jj. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - kk. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
 - ll. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro;

- mm. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang;
 - nn. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan;
 - oo. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember; dan
 - ss. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif Renja PD;

Pasal 7

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH LINDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, mengamanahkan bahwa Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026. Oleh sebab itu maka Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 disusun.

Dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang di sektor peternakan, penyusunan rencana strategis menjadi landasan yang krusial bagi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2025-2026 menjadi periode kritis di mana tantangan dan peluang yang kompleks akan mempengaruhi kemajuan sektor ini secara signifikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan peternakan perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan upaya bersama menuju pembangunan berkelanjutan.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor peternakan. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin meningkat. Oleh karena itu, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur harus mampu merumuskan rencana strategis yang tidak hanya responsif terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan.

Keterlibatan masyarakat peternakan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya menjadi aspek penting dalam merumuskan langkah-langkah yang komprehensif. Dalam hal ini, dialog lintas sektor dan partisipasi aktif semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan.

Perkembangan Terkini Pertumbuhan teknologi dan globalisasi berpengaruh signifikan terhadap sektor peternakan. Revolusi industri 4.0 membawa peluang baru dalam peningkatan efisiensi produksi, manajemen data, dan pemasaran produk

peternakan. Di samping itu, isu-isu global seperti perubahan iklim, Penyakit Hewan Menular Strategis, dan kesejahteraan hewan juga memerlukan perhatian serius. Sebagai upaya menyikapi dinamika tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur harus mampu merumuskan rencana strategis yang holistik, mencakup inovasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas peternakan.

Pada November 2015 Indonesia telah menandatangani SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di PBB. Komitmen ini mengharapkan seluruh negara dan pemangku kepentingan berkolaborasi dalam aksi mengatasi kemiskinan melalui langkah-langkah transformative dan berkelanjutan.

Isu kemiskinan memang masih menjadi pekerjaan rumah paling besar bagi negara dan pemangku kepentingan lain. Apabila dilihat lebih dalam melalui indikator-indikator pembangunan manusia yang digunakan secara global, secara umum perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Ketertinggalan pembangunan tersebut pada akhirnya mengakibatkan atau menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan gender terutama pada perempuan.

Angka kemiskinan di wilayah perdesaan hampir selalu lebih besar dibanding perkotaan. Hal ini terutama disebabkan lapangan pekerjaan yang relative lebih kecil dibanding perkotaan, nilai tambah di sector hulu yang sebagian besar di perdesaan relative lebih rendah dibanding sector hilir yang biasanya di perkotaan, nilai tukar petani juga relative lebih rendah dibanding sector lain. Peternak yang biasanya merupakan bagian dari penduduk perdesaan tentu juga mengalami nasib yang sama yaitu bagian dari kantung kemiskinan. Selain itu, pandemic covid 19 yang berlangsung hampir 2 tahun juga berdampak makin memperburuk wajah kemiskinan di Jawa Timur.

Oleh karenanya program/kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu upaya pemerintah mengangkat peternak dari garis kemiskinan dengan cara meningkatkan kontribusi peternakan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur. Sasaran program/kegiatan ini memang masih umum untuk masyarakat perdesaan yang berkelompok, belum fokus pada lokus perempuan.

Rencana strategis ini dibuat untuk merinci langkah-langkah konkrit dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di sektor peternakan. Diharapkan rencana ini dapat menjadi panduan untuk mengambil kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan di sektor peternakan Provinsi Jawa Timur. Manfaat yang ingin dicapai dari rencana ini untuk peningkatan produksi dan produktivitas peternakan, peningkatan kesejahteraan peternak, serta kontribusi yang berkelanjutan terhadap perekonomian.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra kedua 2019-2024 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13-238/2021).

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 72 Seri E).
30. Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Renstra

Dokumen Perubahan Renstra 2025-2026 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sub kategori Peternakan yang akan dilaksanakan secara bertahap tiap tahun untuk periode lima tahunan.

b. Tujuan penyusunan Renstra

Renstra Dinas Peternakan tahun 2025-2026 , ditetapkan dengan tujuan:

- 1) Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Peternakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2025-2026;
- 2) Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan selama periode tahun 2025-2026;
- 3) Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan;
- 4) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan tolak ukur dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Peternakan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;

| | |
|----------|---|
| | 2. Dasar hukum penyusunan; |
| | 3. Maksud dan tujuan; dan |
| | 4. Sistematika penulisan. |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
| | 1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD; |
| | 2. Sumber daya PD; |
| | 3. Kinerja pelayanan; dan |
| | 4. Kelompok sasaran layanan |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| | 1. Permasalahan pelayanan PD; dan |
| | 2. Isu strategis. |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| | 1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada : |
| | a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026; dan/atau |
| | b. Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah. |
| | 2. Cascading kinerja PD. |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| | Bab VII |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Subsektor peternakan merupakan hal yang penting bagi bangsa ini, yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Industri dan pelaku usaha peternakan mayoritas terdapat di Pulau Jawa. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan dan konsumsi produk-produk peternakan (daging, susu dan telur) di Pulau Jawa relatif lebih tinggi dibanding di Luar Pulau Jawa. Selain itu, faktor teknologi dan industri peternakan yang lebih maju di Pulau Jawa berdampak baik pada perkembangan peternakannya.

Pengembangan usaha peternakan di Jawa Timur bisa dibilang masih belum maju dan pesat, padahal permintaan dari dalam dan luar provinsi sangatlah besar. Konsumsi daging, telur serta susu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Belum lagi pemberitaan belakangan ini mengenai naiknya harga produk-produk tersebut di pasaran yang membuat banyak pelaku usaha peternakan menjadi kurang bergairah.

Meskipun terbilang banyak pelaku usaha di bidang peternakan, nyatanya sebagian besar pelaku usaha tersebut adalah peternak tradisional dengan skala atau jumlah kepemilikan ternak yang masih sangat sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan hasil peternakan yang diperoleh belum optimal. Cara pemeliharaan yang digunakan juga masih tradisional sehingga pertumbuhan ternak cenderung lambat. Dampaknya terkait keuntungan yang dihasilkan pun tidak bisa maksimal.

Sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan tentunya juga sangat mempengaruhi hasil peternakan secara langsung. Sarana dan prasarana tersebut antara lain berupa lahan untuk perkandangan, fasilitas air bersih, serta akses jalan lingkungan. Pada saat ini, banyak peternak yang sudah mulai kesulitan mencari lokasi yang bagus untuk digunakan beternak karena sebagian besar sudah mulai dialihfungsikan untuk kawasan pemukiman dan industri.

Di Jawa Timur maupun Indonesia secara umum, masih belum banyak sumber daya manusia yang berorientasi untuk menghasilkan ternak sesuai permintaan pasar. Kemampuan manajerial, wawasan, dan pengetahuan yang memadai benar-benar dibutuhkan dalam dunia peternakan khususnya peternak-peternak yang tergabung dalam wadah kelompok ternak khususnya sapi, kambing dan domba.

Seperti sudah kita ketahui bersama, faktor pakan menjadi kebutuhan utama dalam usaha peternakan yang sering mengalami masalah khususnya terkait kualitas dan kontinuitas. Hingga saat ini sebagian besar peternak ruminansia masih bergantung pada pakan hijauan yang semusim dan pemanfaatan limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Di wilayah-wilayah tertentu, peternak lebih sering menggunakan limbah hasil pertanian karena di daerah tersebut cukup sulit mendapatkan pakan hijauan. Dalam hal inilah diperlukan banyak enterpreneur atau wirausahawan yang paham dan ahli di bidang nutrisi dan teknologi pakan ternak agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk pengganti atau tambahan pakan yang bergizi bagi ternak, sehingga ternak dapat tumbuh dengan sehat dan sesuai tujuan dari usaha peternakannya tersebut.

Dari beberapa pokok permasalahan yang dijabarkan diatas, harusnya membuat banyak orang mulai tergerak untuk menjalani usaha peternakan dengan lebih serius lagi, agar Jawa Timur maupun Indonesia dapat keluar dari krisis pangan hewani melalui optimalisasi budidaya ternak secara mandiri dan tidak bergantung atas luar negeri.

Industri peternakan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya, kelompok ini masuk dalam kelompok marginal. Terdapat banyak masalah yang dijumpai di lapangan. Ada persoalan mendasar dalam sistem industri yang berlaku. Hal itu kelihatan melalui berbagai bentuk ungkapan aspirasi yang dilakukan para petani peternak, menyuarakan masalah yang mereka hadapi.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, peternak mandiri berulang kali menggelar demonstrasi mengeluhkan masalah yang mereka hadapi. Mereka mencurigai adanya keanehan dalam rantai usaha peternakan khususnya ayam baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Hal tersebut salah satunya tercermin dari selisih harga antara harga yang berlaku di tingkat konsumen dengan harga ternak hidup di tingkat peternak. Pembahasan tentang persoalan ini dapat dilihat dari analisis sistem industrinya. Sistem industri adalah suatu sistem yang dibangun dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan terorganisir yang bertujuan untuk menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti teknologi, manajemen dan sumber daya manusia.

Dalam konteks industri peternakan, elemen-elemen pembentuk sistemnya berkaitan dengan proses bisnis utama budidaya peternakan yaitu mulai dari produksi

bibit, pemberian pakan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran produknya, dimana masing-masing elemen sistem tersebut memiliki saling ketergantungan yang tinggi untuk berjalannya sistem industri secara efektif.

Setiap proses bisnis utama yang juga dikenal dengan panca usaha ini, dapat dijalankan oleh aktor atau pelaku sama atau berbeda. Hanya saja untuk dapat menjalankan keseluruhannya dibutuhkan skala ekonomi yang sesuai. Mayoritas peternak rakyat tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan keseluruhannya. Hal itu disebabkan di antara proses tersebut membutuhkan investasi yang besar serta memerlukan teknologi tinggi dan mahal. Karena itu para peternak mandiri biasanya hanya fokus pada pengelolaan pemeliharaan di kandang.

Di lain pihak perusahaan pemilik modal yang memiliki akses dana kuat mampu menjalankan keseluruhan proses bisnis itu secara integratif. Mulai dari pembibitan, memproduksi pakan berkualitas, penguasaan distribusi obat, pemeliharaan di kandang hingga mengelola pemasaran. Dengan model integratif tersebut maka akan diperoleh efisiensi yang tinggi. Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengontrol input hingga output. Mereka mampu mengontrol biaya produksi, sekaligus posisi tawar harga jual yang kuat.

Jika dilihat dari perspektif supply chain dan value chain, kita akan dapat melihat saling ketergantungan antara proses bisnis utama dan aktor pada setiap segment. Namun pihak yang menguasai lebih banyak proses bisnis akan menjadi penentu dalam industri ini, kemudian menjelma menjadi sistem industri yang monopolistik. Sistem industri peternakan kita menunjukkan bahwa segelintir perusahaan besar memiliki penguasaan sangat dominan pada keseluruhan aktivitas utama. Sehingga perusahaan itu menjadi pengatur berjalannya sistem.

Persoalan utama yang ada saat ini adalah nyaris seluruh peternak rakyat atau peternak mandiri berada pada posisi yang sangat lemah. Mereka tidak memiliki posisi tawar terhadap supplier yang memasok komponen input seperti bibit, pakan dan obat, pada saat yang sama, juga tidak memiliki posisi tawar dari sisi penjualan, karena pasar dikuasai oleh pemain besar. Dengan posisi peternak rakyat sedemikian di dalam sistem industri peternakan, maka hidup mati mereka ditentukan oleh pemain besar. Pemain besar dapat menentukan harga bibit, harga pakan dan harga obat, sekaligus menentukan harga jual kepada konsumen. Sering menjadi keluhan peternak mandiri bahwa pada saat harga input naik, tidaklah serta merta diikuti dengan harga jual produksinya. Mereka

menghadapi situasi sulit, bahkan sering kali harga penjualan lebih tinggi dari biaya pokok produksi yang telah dikeluarkan. Jika terus dibiarkan, maka peternak rakyat atau peternak mandiri akan terusir dari sistem industri ini. Atau pada akhirnya bersedia hanya sekedar menjadi buruh atau pekerja bagi pengusaha besar, meski dikemas dengan istilah kemitraan, namun tidak sejajar.

Pemerintah perlu segera membuat regulasi untuk mencegah berlanjutnya praktik monopoli dalam sistem industri ini. Perusahaan besar perlu dibatasi penguasaannya, agar peternak rakyat atau peternak mandiri memiliki posisi tawar, berbekal regulasi yang berpihak pada rakyat. Ada jutaan jiwa yang menggantungkan harapan masa depan dalam industri peternakan ini, sehingga mengaturnya agar berjalan sehat adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengatur model industri ini agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Selaras dengan laju pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada permintaan atas produk produk pangan khususnya dari komoditas peternakan, maka pemerintah dituntut untuk terus melakukan pengembangan dan optimalisasi terkait peningkatan kualitas, produktifitas dan kontinuitas atas produk produk yang dihasilkan. Paradigma bahwa peternakan hanya sebagai usaha sampingan dengan skala ekonomi rendah perlu diubah menjadi suatu usaha yang dilakukan secara intensif dan memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi dalam usahanya hal tersebut penting agar masyarakat khususnya peternak dapat memperoleh hasil yang optimal dari hasil usahanya sehingga akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas peternakan sebagai salah satu unsur yang berpengaruh dalam pemenuhan produk-produk hewani perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada meskipun dalam skala keterbatasan (Biaya, Lahan, SDM dan lain – lain). Perlu adanya pemanfaatan dan pengelolaan atas sumber daya alam yang selama ini belum dikelola dengan baik. Dalam hal ini adopsi teknologi yang tepat sasaran dan tepat guna menjadi suatu keniscayaan untuk memperoleh hasil yang optimal. Integrasi dan kolaborasi dengan subsector lain khususnya pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan diperlukan untuk memperoleh sumber daya yang murah, mudah dan terjangkau ketersediaannya.

Pemanfaatan sumber daya local sangat penting untuk mengurangi ketergantungan atas importasi dari luar negeri, dikarenakan hingga saat ini untuk subsector peternakan masih tergantung atas impor antara lain pakan, bibit dan obat-obatan dan peralatan mesin peternakan.

Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa “Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri”, hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh, dan halal tersebut. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit Nomor Kontrol Veteriner sangat berkepentingan agar semua unit usaha produk hewan di Jawa Timur dapat memenuhi standar tersebut. Lalulintas hewan dan produk hewan juga menjadi salah satu fungsi dinas peternakan sehingga ternak dan produk asal ternak yang beredar di Jawa Timur sehat serta memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memiliki program dan kegiatan untuk membantu mengurangi permasalahan yang terjadi di dunia peternakan yang telah dijabarkan dalam paragraf pertama antara lain masalah SDM, Pakan, Sarana Prasarana serta penyakit hewan. Selain fungsi diatas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur juga memiliki fungsi kontroling supply demand produk peternakan untuk menjaga kestabilan harga produk peternakan dipasaran. Program dan Kegiatan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh industri peternakan pada umumnya.

Tabel. 2.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi Jawa Timur 2023

| Jenis Fasilitas | Jumlah Capaian |
|---|----------------|
| RPH | 131 |
| RPH ber-NKV | 36 |
| Unit Usaha Ber-NKV sampai tahun 2023 | 671 |
| a. Level III | 129 |
| b. Level II | 279 |
| c. Level I | 457 |
| Juleha | 136 |
| Butcher | 74 |
| Keurmaster | 96 |
| Auditor NKV | 19 |
| Pengawas Kesmavet | 15 |

Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber daya manusia (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan pendukung sektor pertanian) dan sarana prasarana peternakan yang terbatas. Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena penyakit hewan menular.

Tingkat kematian ternak karena penyakit hewan menular pada induk sapi saat ini, belum dapat diasuransikan. Hal ini disebabkan oleh pihak asuransi menilai bahwa kondisi tersebut tidak layak secara ekonomi. Idealnya ternak yang dapat diasuransikan antara lain: ternak yang memiliki kondisi fisik sehat dan induk produktif (bibit). Asuransi ternak masih perlu dipopulerkan pada peternak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas budidaya.

Peran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat strategis karena merupakan motor penggerak dan koordinator pembangunan peternakan di Jawa Timur. Intervensi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pemerintah adalah dari sisi kebijakan, pembinaan, dan pengawasan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas pembantuan. menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum(non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah Dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan

Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan. Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- c. pengelolaan sumber daya genetik hewan yang terdapat pada lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
- d. pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengendalian peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
- f. penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;
- g. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
- j. pelaksanaan koordinasi perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perbibitan, pakan dan produksi peternakan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesehatan hewan. Bidang Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan hewan;
- b. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;

- c. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas daerah Provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan pada hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi serta telur tetas dari dan ke wilayah Provinsi;
- e. pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/ kompartemen bebas
- f. pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan di daerah Provinsi;
- g. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan hewan;
- h. pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
- i. pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usahapelaku usaha obat hewan;
- j. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengolahan kelembagaan kesehatan hewan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan kebijakan penerapan higiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;
- d. pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah Provinsi, pengawasan praktek higiene sanitasi dan biosekuriti produsen produk hewan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan;

- f. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk hewan di pos pemeriksaan hewan/produk hewan (*check point*);
- g. pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;
- h. pemberian rekomendasi penerbitan izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/ investasi usaha agribisnis peternakan;
- d. pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan harga komoditi peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
- h. pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;

- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara umum, keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 tidak terlepas dari dukungan sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, lahan, komoditas beserta sarana dan prasarana

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 berjumlah 201 orang untuk mengisi jabatan struktural, jabatan fungsional teknis, dan jabatan pelaksana. Komposisi jabatan struktural sebagaimana Gambar 2.1. Rincian komposisi PNS tercantum dalam Tabel 2.1 – Tabel 2.4. berikut.

*Tabel 2.2.
Komposisi PNS menurut Jabatan*

| No. | Jabatan PNS | Jumlah | Prosentase |
|-----|------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1 | Jabatan Struktural | 50 | 24,8% |
| 2 | Jabatan Fungsional Teknis | 62 | 30,8% |
| | Medik Veteriner Pertama | 10 | Jenis jabatan fungsional |
| | Medik Veteriner Muda | 7 | |
| | Paramedik Veteriner Terampil | 7 | |
| | Paramedik Veteriner Mahir | 2 | |
| | Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama | 4 | |
| | Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda | 1 | |
| | Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama | 5 | |
| | | 1 | |
| 3 | Jabatan Pelaksana | 89 | 44,2% |
| | Jumlah | 201 | 100% |

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas Peternakan didominasi oleh jabatan pelaksana sebanyak 57,7%, sedangkan jabatan fungsional teknis hanya 16,4 %.

*Tabel 2.3.
Komposisi PNS menurut Pendidikan Formal*

| No. | Pendidikan PNS | Jumlah | Prosentase |
|-----|----------------|--------|------------|
| 1 | SD | 4 | 1,99% |
| 2 | SLTP | 5 | 2,4% |
| 3 | SLTA | 30 | 14,9% |
| 4 | D III | 16 | 7,9% |
| 5 | S1 | 98 | 48,75% |

| | | | |
|---|---------------|------------|-------------|
| 6 | S2 | 46 | 22,88% |
| 7 | S3 | 2 | 0,9% |
| | Jumlah | 201 | 100% |

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas Peternakan sebagian besar berpendidikan formal S1, yaitu sebanyak 48,75%. Tetapi masih ada PNS yang berpendidikan formal sangat rendah, yaitu SD sebanyak 1,99% dan SLTP sebanyak 2,4 %. Kedepannya diharapkan agar semua PNS berpendidikan formal minimal SLTA.

*Tabel 2.4.
Komposisi PNS menurut Umur*

| No. | Umur PNS | Jumlah | Prosentase |
|-----|---------------|------------|-------------|
| 1 | 20-24 | 1 | 0,49 |
| 2 | 25-29 | 22 | 10,94 |
| 3 | 30-34 | 23 | 11,44 |
| 4 | 35-39 | 25 | 12,43 |
| 5 | 40-44 | 9 | 4,47 |
| 6 | 45-49 | 24 | 11,94 |
| 7 | 50-54 | 45 | 22,38 |
| 8 | 55-57 | 49 | 24,37 |
| 9 | 58-59 | 3 | 1,49 |
| | Jumlah | 201 | 100% |

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas Peternakan sebagian besar berumur diatas 50 tahun, yaitu sebesar 48,24%. Jika tidak ada pengadaan PNS, maka dalam 2 tahun kedepan PNS Dinas Peternakan menyusut sebanyak 35 %.

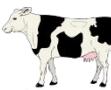
*Tabel 2.5.
Komposisi PNS menurut Gender*

| No. | Gender | Jumlah | Prosentase |
|-----|---------------|------------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 103 | 51,24% |
| 2 | Perempuan | 98 | 48,75% |
| | Jumlah | 201 | 100% |

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di Dinas Peternakan didominasi gender laki-laki yaitu sebanyak 51,75 %.

2.2.2 Sumber Daya Alam

Pentingnya potensi sumber daya alam dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah di bidang peternakan tidak dapat diabaikan. Analisis ini dapat mencakup beberapa aspek kunci yang mendemonstrasikan betapa vitalnya pemanfaatan sumber daya alam dalam mengembangkan sektor peternakan. Jawa Timur merupakan lumbung pangan protein Hewani. Jawa Timur menempati posisi Peringkat 1 nasional baik populasi maupun produksi di hampir seluruh komoditas peternakan. Dibawah ini merupakan tabel populasi dan produksi peternakan di Jawa Timur

| JAWA TIMUR LUMBUNG PETERNAKAN NASIONAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Populasi dan Produksi 2019-2022 | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Sapi Potong | Sapi Perah | Kambing | Ayam Petelur | Ayam pedaging | Daging Sapi | Telur | Susu Sapi |
| 2019 | 4.705.067 ekor | 287.196 ekor | 3.524.899. ekor | 110.527.121 ekor | 254.632.036 ekor | 103.291 ton | 1.700.299 ton | 521.123 ton |
| 2020 | 4.823.970 ekor | 293.556 ekor | 3.645.822 ekor | 108.960.399 ekor | 237.915.929 ekor | 91.027 ton | 1.692.162 ton | 542.860 ton |
| 2021 | 4.928.987 ekor | 305.708 ekor | 3.741.903 ekor | 110.527.121 ekor | 283.036.660 ekor | 108.284 ton | 1.549.077 ton | 530.426 ton |
| 2022 | 4.922.628 ekor | 282.634 ekor | 3.561.686 ekor | 111.485.975 ekor | 421.861.561 ekor | 100.206 ton | 1.639.969 ton | 448.954 ton |

Di Jawa Timur pada akhir tahun 2022 populasi sapi potong mengalami sedikit penurunan sebesar (0,13%) dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih berada pada kisaran angka 4,9 juta ekor, sedangkan sapi perah mengalami penurunan populasi yang cukup signifikan. Hal ini merupakan imbas dari merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur dan juga Nasional. Secara berurutan populasi Ternak Besar di Jawa Timur yaitu Sapi Potong 4.928.987 ekor, Sapi Perah 282.364 ekor, Kerbau 18.977 ekor dan Kuda 9.982 ekor.

Secara umum untuk komoditas sapi potong, sapi perah dan ayam ras petelur Jawa Timur menempati peringkat 1 nasional baik dari sisi populasi maupun produksinya, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan namun Jawa Timur tetap menjadi peringkat 1 nasional. Selaras dengan Jumlah populasi ternak yang banyak, Jawa Timur juga juga harus memperhatikan Sumber Daya Alam lainnya, berikut adalah beberapa Sumber Daya Alam di Bidang Peternakan yang perlu diperhatikan: (a) Ketersediaan Lahan Hijauan: Lahan hijau dan tanah yang subur menjadi dasar penting untuk pengembangan peternakan. Pemerintah Perlu

mengidentifikasi dan mengalokasikan lahan yang tepat untuk pemeliharaan hewan ternak, baik itu untuk padang rumput, lahan pakan, atau tempat pemeliharaan hewan. (b) Keanekaragaman Tanaman Pakan Ternak: Sumber daya alam seperti Pakan Ternak sangat penting untuk memastikan ketersediaan pakan yang cukup dan bervariasi. Perencanaan harus melihat aspek ini untuk memitigasi risiko kelangkaan pakan dan memastikan kesehatan hewan ternak. (c) Kondisi Iklim dan Curah Hujan: Faktor iklim dan curah hujan memiliki dampak signifikan terhadap peternakan. Pemerintah daerah perlu memahami pola iklim setempat untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Dokumen perencanaan harus mencakup strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan dampaknya pada peternakan. (d) Sumber Daya Air: Ketersediaan air bersih adalah aspek kritis dalam peternakan. Analisis perlu mempertimbangkan keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya air untuk keperluan minum hewan ternak, sanitasi, dan irigasi untuk tanaman pakan. (e) Pengelolaan Limbah Ternak: Pengelolaan limbah ternak memerlukan strategi yang bijaksana dan terpadu. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi metode pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali untuk mendukung pertanian dan lingkungan setempat. (f) Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan praktik peternakan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial daerah tersebut.

Melalui integrasi potensi sumber daya alam dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah di bidang peternakan, diharapkan dapat tercipta keberlanjutan dan keberagaman dalam pengembangan sektor peternakan, memastikan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan lingkungan setempat.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Pembangunan peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki serta meningkatkan gizi masyarakat, juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan jumlah serta mutu ternak. Untuk peningkatan jumlah serta mutu ternak diperlukan sarana dan prasarana yang baik.

➤ Ketersediaan Pakan Ternak

Pakan ternak sapi yang diberikan secara umum berupa hijauan (rumput-rumputan dan leguminosa atau kacang-kacangan) dan pakan buatan (konsentrat). Pakan yang diberikan dapat digolongkan menjadi bahan hijauan segar, hijauan kering (hay), pakan yang diawetkan. Pakan hijauan berupa rumput dan hijauan lainnya merupakan pakan pokok bagi peternakan yang dikelola secara tradisional. Pakan hijauan terdiri dari hijauan rumput (rumput alam, rumput budidaya) dan hijauan leguminosa (kacang-kacangan) yang kaya akan protein. Peran pemerintah untuk membantu peningkatan hijauan pakan dengan bantuan irigasi perpipaan dan perpompaan serta bantuan sarana pengolahan pakan ternak.

| Jenis Alsintan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Irigasi Perpompaan | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Irigasi Perpipaan | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Chopper | 32 | | | 8 | 1 |
| Mixer | 4 | | | | |
| Hammer Mill | 4 | | | | |
| Disk Mill | 4 | | | | |
| Mesin Pallet | 4 | | | | |
| Mesin Jahit Karung | 1 | | | | |
| Alat Angkut 3 Roda | 1 | | 2 | | |
| Mesin Pengereng | 1 | | | | |
| Mesin Press Manual | | | 2 | | |
| Mesin Sprayer | | | | | 1 |
| Baller Silase | | | | | 1 |

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Selain bantuan alat yang diberikan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur juga memberikan Bimbingan teknis untuk kelompok ternak baik bimbingan teknis pembuatan pakan ternak maupun bimbingan teknis manajemen pemeliharaan ternak yang menganut system *Good Farming Practice*.

➤ Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan existing atau lokasi baru yang memiliki SDA sesuai agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau spot partial (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak yang memadai. Kawasan peternakan harus memiliki lahan padang penggembalaan atau hijauan makanan ternak, serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-tanaman perkebunan, ternak-tanaman pangan, ternak-tanaman hortikultura. Menurut Permentan NO.18/ Permentan/RC.040/4/2018 bahwa Lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang

terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura.

2.3 Aset Tetap

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset tetap Lainnya. Adapun data rekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan pembedangan barang dapat dilihat pada Tabel 2.6

*Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap*

| No | Pembedangan Barang | Nilai (Rp) |
|--------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Tanah | 769.777.780.288 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 88.582.519.422 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 83.111.576.796 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4.907.778.908 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 6.829.531.460 |
| JUMLAH | | 862.143.699.662 |

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2021 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang memiliki tujuan “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subkategori peternakan” dapat disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas fungsi | Target IKK 2023 | Target Indikator Lainnya | Target Renstra perangkat daerah tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke | | | | |
|----|---|-----------------|--------------------------|--|------|------|-------------|-------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tujuan: Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan (PDRB ADHK) | 1,21 – 2,46 | - | 2,94 | 1,30 | 1,77 | 1,21 – 2,46 | 1,21 – 2,46 | 2,56 | 2,38 | 3,31 | 1,79 | 4,99 | 87,07 | 183,08 | 187,01 | 147,93 | 202 |
| 2 | Sasaran : Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan | | - | | 1,67 | 1,98 | 2,23 | 2,44 | 3,95 | 3,69 | 6,22 | 6,35 | 10,04 | 236,53 | 186,36 | 278,92 | 260,25 | 411 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | - | | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 83,59 | 84,57 | 85,55 | 86,44 | 86,83 | 101,32 | 101,89 | 102,46 | 102,90 | 103 |

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Pertumbuhan PDRB Sub kategori Peternakan di Jawa Timur menurun pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Pertumbuhan PDRB Sub kategori Peternakan di Jawa Timur Atas dasar harga konstan (ADHK), tahun 2022 sebesar 35.513,87 Miliar Rupiah atau meningkat 1,79 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar 34.889,65 Miliar Rupiah. Pada tahun 2022 terdapat faktor Yng mempengaruhi tidak optimalnya pencapaian target kinerja tersebut, diantaranya yaitu adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sejak awal Mei 2022 mulai menyebar di Jawa Timur. Penyakit PMK tersebut sangat berdampak terhadap populasi dn produktivitas ternak karena menyebabkan kematian dan penurunan reproduksi. Diperkirakan 7.000-an hewan ternak terjangkit PMK di Jawa Timur pada akhir Mei 2022 dan terus naik dalam kurun waktu setidaknya 3 bulan. Lambatnya penanganan wabah PMK karena belum tersedianya obat dan vaksin khusus PMK serta peternak maupun petugas pelayanan Kesehatan hewan belum terbiasa mengendalikan wabah PMK tersebut karena merupakan wabah baru pada generasi saat ini. Dampak wabah ini adalah berupa penurunan produksi daging dan susu dan akan mempengaruhi sub sektor Peternakan dan industri berbahan baku daging serta susu. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dengan cepat dan segera melakukan upaya menanggulangi penyebaran wabah PMK tersebut antara lain melalui pengendalian mobilitas ternak, penanganan ternak terjangkit, dan pelaksanaan vaksin PMK yang akan dilaksanakan segera melalui Belanja Tidak Terduga dan/atau Belanja Barang dan Jasa pada P-APBD mendahului Tahun Anggaran 2022. Diharapkan pada tahun 2023 sub sektor Peternakan, dan industri berbahan baku daging dan susu dapat pulih kembali dan tumbuh sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Timur.

Adapun indikator Sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan antara lain :

- 1) Pertumbuhan populasi ternak yang terus mengalami peningkatan seiring dengan penerapan berbagai program/kegiatan strategis dan tepat sasaran berbasis peternakan rakyat. Produksi komoditas utama peternakan yakni daging, telur dan susu terus mengalami peningkatan, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Disamping itu juga ditambah dari kontribusi produk samping lain dari peternakan seperti kulit, bulu unggas dan limbah.
- 2) Harga produk komoditas utama peternakan (daging, telur dan susu) cenderung terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan produk-produk peternakan tersebut.
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan sertifikasi bibit dan pakan ternak dalam rangka mendorong peningkatan populasi dan produktivitas komoditas utama peternakan di Jawa Timur.
- 4) Keberhasilan Program Penjaminan Kesehatan Hewan dalam menekan angka kejadian penyakit hewan strategis dan angka kematian ternak meskipun pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) namun upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan agar penyebaran PMK tidak meluas telah dilakukan secara maksimal dengan pengobatan pemberian vitamin dan vaksinasi pada ternak.
- 5) Pembinaan, fasilitasi dan sertifikasi unit usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan, baik pangan maupun non pangan.
- 6) Fasilitasi aksesibilitas permodalan dan asuransi ternak dan Pembinaan kelembagaan peternak.
- 7) Meningkatnya jasa-jasa pendukung dan yang terlibat didalam usaha peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian diperlukan langkah – langkah strategis kedepan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan korporasi, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- b. Memfasilitasi aksesibilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya.

- c. Memberikan penyuluhan *good farming practice* secara berkala kepada para peternak.
- d. Mendatangkan ternak indukan impor yang berkualitas.
- e. Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil.
- f. Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.
- g. Penjaminan produk asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal yang sesuai dengan standar Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak dengan cara inseminasi buatan dan Transfer Embrio Ternak terutama sapi kerbau kambing domba.
- i. Mengadakan alat pengolah pasca panen bagi usaha peternakan skala kecil.
- j. Kerjasama dengan lembaga penelitian peternakan untuk mengembangkan teknologi peternakan di masyarakat.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tersebut didukung oleh program pembangunan peternakan diantaranya program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program perizinan usaha pertanian, program penyuluhan pertanian, dan didukung program rutin perkantoran yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Peternakan provinsi Jawa timur terdiri dari 5 Bidang dan 10 UPT yang mempunyai tugas fungsi masing-masing serta kelompok sasaran layanan yang berbeda. Adapun kelompok sasaran layanan antara lain :

1. Peternak atau kelompok peternak, pelaku usaha peternakan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan hewan seperti vaksin dan obat-obatan
2. Peternak atau kelompok peternak, pelaku usaha peternakan yang membutuhkan Rekomendasi keluar masuk ternak dan produk peternakan
3. Pelaku usaha yang memerlukan sertifikasi NKV
4. Masyarakat umum yang memerlukan Layanan Pengujian Laboratorium Pakan, Kesehatan Hewan maupun Kesehatan Masyarakat veteriner

5. Peternak atau kelompok peternak yang memerlukan layanan Inseminasi BUatan dan Pemeriksaan Kebuntingan
6. Pelaku Usaha Pakan ternak yang memerlukan rekomendasi pendaftaran Nomor Pakan
7. Bimbingan teknis untuk kelompok peternak
8. Penyebaran Bibit HPT untuk kelompok ternak
9. Kelompok Peternak yang memerlukan bantuan Bibit ternak untuk peningkatan populasi ternak di Jawa Timur
10. Kelompok Peternak yang membutuhkan bimbingan untuk pembentukan korporasi petani
11. Bimbingan teknis dan pemberian bantuan untuk pascapanen bagi kelompok peternak
12. Peternak yang ingin mengasuransikan ternak dengan program AUTS

Tabel.2.3.2 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-----------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------------------|------|------|------|---|--------------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5.825.606.800 | | | | | 5.164.166.782 | | | | | 88,65 | | | | | | 88,65 |
| Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 5.825.606.800 | | | | | 5.164.166.782 | | | | | 88,65 | | | | | | 88,65 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8.252.037.000 | | | | | 7.320.694.476 | | | | | 88,71 | | | | | | 88,71 |
| Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 4.526.542.000 | | | | | 3.869.772.043 | | | | | 85,49 | | | | | | 85,49 |
| Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 3.725.495.000 | | | | | 3.450.922.433 | | | | | 92,63 | | | | | | 92,63 |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | 3.429.013.200 | | | | | 2.719.481.405 | | | | | 79,31 | | | | | | 79,31 |
| Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah | 2.400.194.200 | | | | | 1.860.267.793 | | | | | 77,5 | | | | | | 77,5 |
| Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah | 1.028.819.000 | | | | | 859.213.612 | | | | | 83,51 | | | | | | 83,51 |
| Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah | 2.440.073.000 | | | | | 2.322.264.739 | | | | | 95,17 | | | | | | 95,17 |
| Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan | 1.015.323.000 | | | | | 983.137.784 | | | | | 96,83 | | | | | | 96,83 |
| Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | 578.000.000 | | | | | 540.554.880 | | | | | 93,52 | | | | | | 93,52 |
| Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data | 778.000.000 | | | | | 733.375.875 | | | | | 94,26 | | | | | | 94,26 |
| Kegiatan Penyusunan laporan pengelolaan keuangan | 68.750.000 | | | | | 65.196.200 | | | | | 94,83 | | | | | | 94,83 |
| Program Pelayanan Kesekretariatan | | 9.727.767.200 | | | | | 9.232.179.639 | | | | | 94,91 | | | | | 94,91 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah | | 1.157.542.000 | | | | | 1.098.422.725 | | | | | 94,89 | | | | | 94,89 |
| Pengelolaan Administrasi Keuangan | | 275.850.000 | | | | | 266.967.060 | | | | | 96,78 | | | | | 96,78 |
| Ketatausahaan dan Kepegawaian | | 8.294.375.200 | | | | | 7.866.789.854 | | | | | 94,84 | | | | | 94,84 |
| Program Peningkatan Produksi Peternakan | 18.136.004.000 | | | | | 15.505.925.864 | | | | | 85,5 | | | | | | 85,5 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|----------------------|----------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|------|------|------|---|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan | | 2.119.175.000 | | | | | 2.100.011.900 | | | | | 99,1 | | | | | 99,1 |
| Kegiatan budidaya ternak | 3.079.200.000 | | | | | 2.948.877.325 | | | | | 95,77 | | | | | | 95,77 |
| Kegiatan Produksi dan Budidaya Ternak | | 518.394.000 | | | | | 517.091.025 | | | | | 99,75 | | | | | 99,75 |
| Kegiatan pengawasan mutu bibit ternak | 2.069.800.000 | | | | | 2.018.040.226 | | | | | 97,5 | | | | | | 97,5 |
| Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perbibitan Ternak | | 571.920.000 | | | | | 565.627.438 | | | | | 98,9 | | | | | 98,9 |
| Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur | 450.000.000 | | | | | 412.169.277 | | | | | 91,59 | | | | | | 91,59 |
| Penataan kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur | | 74.236.000 | | | | | 72.596.337 | | | | | 97,79 | | | | | 97,79 |
| Kegiatan Pembinaan dan pengawasan mutu pakan, penerapan teknologi pakan, dan penyaluran benih HPT | 5.102.004.000 | | | | | 4.469.875.178 | | | | | 87,61 | | | | | | 87,61 |
| Kegiatan Pembinaan dan pengawasan mutu pakan dan penerapan teknologi pakan | | 954.625.000 | | | | | 944.697.100 | | | | | 98,96 | | | | | 98,96 |
| Pembangunan/Perbaikan UPTD Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) | 3.879.000.000 | | | | | 3.368.951.173 | | | | | 86,85 | | | | | | 86,85 |
| Pembangunan/Perbaikan UPTD/Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) | 3.556.000.000 | | | | | 2.288.012.685 | | | | | 64,34 | | | | | | 64,34 |
| Program Pengembangan Agribisnis | 2.997.800.000 | | | | | 2.948.919.949 | | | | | 98,37 | | | | | | 98,37 |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | | 969.967.500 | | | | | 955.710.021 | | | | | 98,53 | | | | | 98,53 |
| Kegiatan pengolahan produk hasil peternakan | 638.400.000 | | | | | 631.704.300 | | | | | 98,95 | | | | | | 98,95 |
| Kegiatan Pembinaan produk hasil peternakan | | 292.550.000 | | | | | 285.972.049 | | | | | 97,75 | | | | | 97,75 |
| Kegiatan informasi pasar dan promosi | 739.600.000 | | | | | 717.584.299 | | | | | 97,02 | | | | | | 97,02 |
| Kegiatan Promosi Pemasaran Hasil Peternakan | | 289.950.000 | | | | | 288.732.550 | | | | | 99,58 | | | | | 99,58 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|----------------------|----------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|------|------|------|---|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Kegiatan investasi usaha dan penguatan kelembagaan kelompok peternak | 1.319.800.000 | | | | | 1.303.733.800 | | | | | 98,78 | | | | | | 98,78 |
| Kegiatan investasi usaha penguatan kelembagaan kelompok peternak | | 374.937.500 | | | | | 370.703.122 | | | | | 98,87 | | | | | 98,87 |
| Kegiatan Program anti kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Peternakan | 300.000.000 | 12.530.000 | | | | 295.897.550 | 10.302.300 | | | | 98,63 | 82,22 | | | | -95,82 | 90,43 |
| Program Penjaminan Kesehatan Hewan | 3.994.600.000 | 2.888.480.000 | | | | 3.786.742.789 | 2.815.934.715 | | | | 94,8 | 97,49 | | | | -27,69 | 96,14 |
| Kegiatan Pengamatan penyakit hewan menular dan penguatan kelembagaan kesehatan hewan | 1.237.400.000 | | | | | 1.155.225.782 | | | | | 93,36 | | | | | | 93,36 |
| Kegiatan Pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan | | 1.141.490.000 | | | | | 1.121.732.573 | | | | | 98,27 | | | | | 98,27 |
| Kegiatan Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis | 1.917.600.000 | 1.287.140.000 | | | | 1.851.160.214 | 1.269.870.617 | | | | 96,54 | 98,66 | | | | -32,88 | 97,6 |
| Kegiatan pengawasan obat hewan | 839.600.000 | 495.850.000 | | | | 780.356.793 | 424.331.525 | | | | 92,94 | 85,58 | | | | -40,94 | 89,26 |
| Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH | 3.542.000.000 | | | | | 3.478.825.964 | | | | | 98,22 | | | | | | 98,22 |
| Program Peningkatan Produk Hewan Standar Kesmavet | | 2.543.881.700 | | | | | 2.503.036.990 | | | | | 98,39 | | | | | 98,39 |
| Kegiatan Penerapan jaminan keamanan pangan | 1.037.200.000 | | | | | 1.028.006.012 | | | | | 99,11 | | | | | | 99,11 |
| Kegiatan Penerapan Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan | | 809.120.700 | | | | | 783.711.643 | | | | | 96,86 | | | | | 96,86 |
| Kegiatan Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan | 1.865.200.000 | | | | | 1.822.572.649 | | | | | 97,71 | | | | | | 97,71 |
| Kegiatan Pengawasan Keamanan lalu lintas peredaran produk hewan | | 1.385.411.000 | | | | | 1.375.794.700 | | | | | 99,31 | | | | | 99,31 |
| Kegiatan Pengawasan, pengendalian zoonosis dan kesejahteraan hewan | 639.600.000 | 349.350.000 | | | | 628.247.303 | 343.530.647 | | | | 98,23 | 98,33 | | | | -45,38 | 98,28 |
| Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan | 1.771.800.000 | 1.257.686.500 | | | | 1.761.246.610 | 1.253.709.260 | | | | 99,4 | 99,68 | | | | -29,02 | 99,54 |
| Kegiatan produksi bibit ayam buras dan hijaun | 766.712.000 | 386.386.500 | | | | 760.400.350 | 386.031.660 | | | | 99,18 | 99,91 | | | | -49,6 | 99,54 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|----------------------|----------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|------|------|------|---|--------------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| pakan ternak UPT PT dan HMT Magetan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak ayam buras UPT PT dan HMT Magetan | 40.885.500 | 3.900.000 | | | | 40.465.475 | 3.895.000 | | | | 98,97 | 99,87 | | | | -90,46 | 99,42 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Magetan | 964.202.500 | 867.400.000 | | | | 960.380.785 | 863.782.600 | | | | 99,6 | 99,58 | | | | -10,04 | 99,59 |
| Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri | 1.500.000.000 | 918.539.550 | | | | 1.484.779.085 | 917.396.210 | | | | 98,99 | 99,88 | | | | -38,76 | 99,43 |
| Kegiatan produksi itik mojosari dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Kediri | 903.050.000 | 433.989.550 | | | | 888.666.575 | 433.304.710 | | | | 98,41 | 99,84 | | | | -51,94 | 99,12 |
| Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak itik mojosari UPT PT dan HMT Kediri | 15.000.000 | 9.630.000 | | | | 14.520.000 | 9.619.500 | | | | 96,8 | 99,89 | | | | -35,8 | 98,35 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Kediri | 581.950.000 | 477.450.000 | | | | 581.592.510 | 477.311.500 | | | | 99,94 | 99,97 | | | | -17,96 | 99,95 |
| Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember | 1.761.800.000 | 911.357.700 | | | | 1.738.403.198 | 909.527.003 | | | | 98,67 | 99,8 | | | | -48,27 | 99,24 |
| Kegiatan produksi bibit domba sapudi dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Jember | 626.785.350 | 355.827.700 | | | | 605.705.200 | 355.019.040 | | | | 96,64 | 99,77 | | | | -43,23 | 98,2 |
| Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak domba sapudi UPT PT dan HMT Jember | 19.600.000 | 9.630.000 | | | | 19.487.500 | 9.619.500 | | | | 99,43 | 99,89 | | | | -50,87 | 99,66 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jember | 1.115.414.650 | 545.900.000 | | | | 1.113.210.498 | 544.888.463 | | | | 99,8 | 99,81 | | | | -51,06 | 99,81 |
| Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang | 1.562.400.000 | 1.268.469.500 | | | | 1.539.107.481 | 1.260.979.150 | | | | 98,51 | 99,41 | | | | -18,81 | 98,96 |
| Kegiatan produksi bibit kambing dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Malang | 822.560.000 | 583.069.500 | | | | 813.312.041 | 578.754.150 | | | | 98,88 | 99,26 | | | | -29,12 | 99,07 |
| Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak kambing UPT PT dan HMT Malang | 4.800.000 | 25.000.000 | | | | 4.730.000 | 22.200.000 | | | | 98,54 | 88,8 | | | | 420,83 | 93,67 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Malang | 735.040.000 | 660.400.000 | | | | 721.065.440 | 660.025.000 | | | | 98,1 | 99,94 | | | | -10,15 | 99,02 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|----------------------|----------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|------|------|------|---|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu | 1.578.600.000 | 1.280.030.000 | | | | 1.508.512.933 | 1.274.515.829 | | | | 95,56 | 99,57 | | | | -18,91 | 97,56 |
| Kegiatan Produksi bibit sapi perah dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Batu | 783.000.000 | 636.615.000 | | | | 729.653.750 | 635.815.350 | | | | 93,19 | 99,87 | | | | -18,7 | 96,53 |
| Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi perah UPT PT dan HMT Batu | 49.000.000 | 16.250.000 | | | | 47.248.500 | 15.732.500 | | | | 96,43 | 96,82 | | | | -66,84 | 96,62 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Batu | 746.600.000 | 627.165.000 | | | | 731.610.683 | 622.967.979 | | | | 97,99 | 99,33 | | | | -16 | 98,66 |
| Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban | 1.579.200.000 | 1.312.450.000 | | | | 1.564.722.813 | 1.304.169.467 | | | | 99,08 | 99,37 | | | | -16,89 | 99,23 |
| Kegiatan Produksi bibit sapi PO dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Tuban | 770.200.000 | 549.125.000 | | | | 761.664.175 | 546.226.200 | | | | 98,89 | 99,47 | | | | -28,7 | 99,18 |
| Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi PO UPT PT dan HMT Tuban | 22.380.000 | 11.025.000 | | | | 22.380.000 | 9.477.100 | | | | 100 | 85,96 | | | | -50,74 | 92,98 |
| Kegiatan Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Tuban | 786.620.000 | 752.300.000 | | | | 780.678.638 | 748.466.167 | | | | 99,24 | 99,49 | | | | -4,36 | 99,37 |
| Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura | 2.434.800.000 | | | | | 2.301.490.142 | | | | | 94,52 | | | | | | 94,52 |
| Program Pembibitan Ternak Sapi Madura dan Pelayanan Kesehatan Hewan | | 1.502.091.000 | | | | | 1.478.994.273 | | | | | 98,46 | | | | | 98,46 |
| Kegiatan Produksi bibit sapi madura dan hijauan makanan ternak UPT PT dan Keswan Madura | 602.788.500 | | | | | 589.944.450 | | | | | 97,87 | | | | | | 97,87 |
| Kegiatan Produksi bibit sapi madura dan hijauan pakan ternak | | 306.196.500 | | | | | 295.133.400 | | | | | 96,39 | | | | | 96,39 |
| Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan di wilayah Madura | 118.521.500 | | | | | 110.432.950 | | | | | 93,18 | | | | | | 93,18 |
| Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | 58.308.000 | | | | | 55.263.600 | | | | | 94,78 | | | | | 94,78 |
| Kegiatan Pelaksanaan administrasi UPT PT dan Keswan Madura | 1.713.490.000 | 1.137.586.500 | | | | 1.601.112.742 | 1.128.597.273 | | | | 93,44 | 99,21 | | | | -33,61 | 96,33 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|----------------------|----------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|------|------|------|---|--------------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan | 2.866.200.000 | 8.893.416.874 | | | | 2.704.430.133 | 8.864.186.362 | | | | 94,36 | 99,67 | | | | 210,29 | 97,01 |
| Kegiatan Pelayanan inseminasi buatan | 1.795.665.000 | | | | | 1.701.783.373 | | | | | 94,77 | | | | | | 94,77 |
| Kegiatan Pelayanan inseminasi buatan (INTAN SELAKSA) | | 7.989.636.874 | | | | | 7.832.463.486 | | | | | 98,03 | | | | | 98,03 |
| Kegiatan Bioteknologi reproduksi | 365.076.500 | 337.407.000 | | | | 332.140.026 | 305.419.609 | | | | 90,98 | 90,52 | | | | -7,58 | 90,75 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Inseminasi Buatan | 705.458.500 | 566.373.000 | | | | 670.506.734 | 546.303.267 | | | | 95,05 | 96,46 | | | | -19,72 | 95,75 |
| Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Malang | 1.561.200.000 | | | | | 1.487.559.806 | | | | | 95,28 | | | | | | 95,28 |
| Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Malang | | 793.519.900 | | | | | 769.627.501 | | | | | 96,99 | | | | | 96,99 |
| Kegiatan Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota | 277.056.000 | | | | | 273.713.200 | | | | | 98,79 | | | | | | 98,79 |
| Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Malang | | 124.794.000 | | | | | 122.297.450 | | | | | 98 | | | | | 98 |
| Kegiatan surveillance, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota | 245.570.000 | | | | | 243.439.250 | | | | | 99,13 | | | | | | 99,13 |
| Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Malang | | 94.995.900 | | | | | 86.071.000 | | | | | 90,6 | | | | | 90,6 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Malang | 1.038.574.000 | 573.730.000 | | | | 970.407.356 | 561.259.051 | | | | 93,44 | 97,83 | | | | -44,76 | 95,63 |
| Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban | 1.613.400.000 | | | | | 1.583.833.448 | | | | | 98,17 | | | | | | 98,17 |
| Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Tuban | | 1.012.320.000 | | | | | 983.746.748 | | | | | 97,18 | | | | | 97,18 |
| Kegiatan Surveillance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota | 252.706.300 | | | | | 249.899.273 | | | | | 98,89 | | | | | | 98,89 |
| Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan | | 150.300.000 | | | | | 149.297.150 | | | | | 99,33 | | | | | 99,33 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|------|------|--------------------|-------------------|----------------|------|------|---|--------------|-------|------|------|-----------------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Masyarakat Veteriner Tuban | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan surveillance, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota | 202.274.500 | | | | | 198.637.150 | | | | | 98,2 | | | | | | 98,2 |
| Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Tuban | | 82.320.000 | | | | | 80.193.750 | | | | | 97,42 | | | | | 97,42 |
| Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Tuban | 1.158.419.200 | 779.700.000 | | | | 1.135.297.025 | 754.225.848 | | | | 98 | 96,73 | | | | | 97,37 |
| Program Peningkatan Agribisnis Persusuan | | 98.096.000 | | | | | 97.376.495 | | | | | 99,27 | | | | | 99,27 |
| Kegiatan Penguatan Perbibitan Sapi Perah | | 59.100.000 | | | | | 58.692.455 | | | | | 99,31 | | | | | 99,27 |
| Kegiatan Penguatan Sentra Peternakan Sapi Perah | | 38.996.000 | | | | | 38.684.040 | | | | | 99,2 | | | | | 99,27 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | 14.665.293.500 | | | | | 13.970.246.782 | | | | | 95,26 | | | | 95,261 |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | 200.000.000 | | | | | 195.750.000 | | | | | 97,88 | | | | 97,875 |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | 200.000.000 | | | | | 195.750.000 | | | | | 97,88 | | | | 97,875 |
| Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | 3.257.432.000 | | | | | 3.170.069.655 | | | | | 97,32 | | | | 97,318 |
| Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | 2.829.335.000 | | | | | 2.761.588.885 | | | | | 97,61 | | | | 97,606 |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | 390.522.000 | | | | | 379.956.460 | | | | | 97,29 | | | | 97,295 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------|------|----------------|------|------|--------------------|------|----------------|------|------|---|------|---------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | 37.575.000 | | | | | 28.524.310 | | | | | 75,91 | | | | 75,913 |
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | 10.657.959.500 | | | | | 10.085.139.607 | | | | | 94,63 | | | | 94,625 |
| Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | 7.477.059.500 | | | | | 7.184.004.874 | | | | | 96,08 | | | | 96,081 |
| Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | | | 886.400.000 | | | | | 859.801.033 | | | | | 97,00 | | | | 96,999 |
| Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | 2.294.500.000 | | | | | 2.041.333.700 | | | | | 88,97 | | | | 88,966 |
| Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | | | 549.902.000 | | | | | 519.287.520 | | | | | 94,43 | | | | 94,433 |
| Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | 124.102.000 | | | | | 111.478.936 | | | | | 89,83 | | | | 89,828 |
| Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | 425.800.000 | | | | | 407.808.584 | | | | | 95,77 | | | | 95,775 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | 576.690.000 | | | | | 567.314.826 | | | | | 98,37 | | | | 98,374 |
| Penataan Prasarana Pertanian | | | 140.000.000 | | | | | 139.315.400 | | | | | 99,51 | | | | 99,511 |
| Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan | | | Rp - | | | | | | | | | | #VALUE! | | | | #DIV/0! |
| Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | | | 140.000.000 | | | | | 139.315.400 | | | | | 99,51 | | | | 99,511 |
| Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 436.690.000 | | | | | 427.999.426 | | | | | 98,01 | | | | 98,01 |
| Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah | | | 364.750.000 | | | | | 357.367.226 | | | | | 97,98 | | | | 97,976 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|----------------------|------|------|--------------------|------|---------------|------|------|---|------|-------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | 71.940.000 | | | | | 70.632.200 | | | | | 98,18 | | | | 98,182 |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | 6.308.963.100 | | | | | 6.187.623.202 | | | | | 98,08 | | | | 98,077 |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 1.657.352.788 | | | | | 1.631.241.276 | | | | | 98,42 | | | | 98,425 |
| Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | | | 501.850.788 | | | | | 494.216.284 | | | | | 98,48 | | | | 98,479 |
| Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 555.502.000 | | | | | 551.902.734 | | | | | 99,35 | | | | 99,352 |
| Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | 600.000.000 | | | | | 585.122.258 | | | | | 97,52 | | | | 97,52 |
| Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | | | 1.614.259.000 | | | | | 1.583.475.277 | | | | | 98,09 | | | | 98,093 |
| Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | | | 256.284.000 | | | | | 247.966.805 | | | | | 96,75 | | | | 96,755 |
| Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | | | 686.760.000 | | | | | 679.693.860 | | | | | 98,97 | | | | 98,971 |
| Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi | | | 671.215.000 | | | | | 655.814.612 | | | | | 97,71 | | | | 97,706 |
| Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | 1.754.000.000 | | | | | 1.702.359.700 | | | | | 97,06 | | | | 97,056 |
| Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi | | | 544.000.000 | | | | | 528.067.350 | | | | | 97,07 | | | | 97,071 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------|------|-----------------------|------|------|--------------------|------|---------------|------|------|---|------|---------|------|------|-----------------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | | | 150.000.000 | | | | | 148.049.500 | | | | | 98,70 | | | | 98,7 |
| Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 1.060.000.000 | | | | | 1.026.242.850 | | | | | 96,82 | | | | 96,815 |
| Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 390.000.000 | | | | | 383.396.240 | | | | | 98,31 | | | | 98,307 |
| Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan | | | 390.000.000 | | | | | 383.396.240 | | | | | 98,31 | | | | 98,307 |
| Kesejahteraan Hewan | | | 893.351.312 | | | | | 887.150.709 | | | | | 99,31 | | | | 99,306 |
| Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | | | 400.000.000 | | | | | 398.733.979 | | | | | 99,68 | | | | 99,683 |
| Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya | | | 493.351.312 | | | | | 488.416.730 | | | | | 99,00 | | | | 99 |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | 421.898.000 | | | | | 418.009.540 | | | | | 99,08 | | | | 99,078 |
| Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 421.898.000 | | | | | 418.009.540 | | | | | 99,08 | | | | 99,078 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | | | 421.898.000 | | | | | 418.009.540 | | | | | 99,08 | | | | 99,078 |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | 10.587.064.000 | | | | | 9.730.655.442 | | | | | 91,91 | | | | 91,911 |
| Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | 9.897.564.000 | | | | | 9.054.188.954 | | | | | 91,48 | | | | 91,479 |
| Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | 539.700.000 | | | | | 535.532.362 | | | | | 99,23 | | | | 99,228 |
| Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | 9.357.864.000 | | | | | 8.518.656.592 | | | | | 91,03 | | | | 91,032 |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | 689.500.000 | | | | | 676.466.488 | | | | | 98,11 | | | | 98,11 |
| Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | | | 500.000.000 | | | | | 490.935.323 | | | | | 98,19 | | | | 98,187 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|-----------------------|------|------|--------------------|------|----------------|------|------|---|------|---------|------|------|-----------------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pendampingan Manajemen Kooporasi Petani | | | 189.500.000 | | | | | 185.531.165 | | | | | 97,91 | | | | 97,906 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 62.064.228.400 | | | | | 54.516.058.908 | | | | | 87,84 | | | | 87,838 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.474.440.700 | | | | | 1.258.092.379 | | | | | 85,33 | | | | 85,327 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 1.208.169.700 | | | | | 1.040.323.871 | | | | | 86,11 | | | | 86,107 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 3.500.000 | | | | | 1.569.450 | | | | | 44,84 | | | | 44,841 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | | | 3.500.000 | | | | | 977.000 | | | | | 27,91 | | | | 27,914 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 2.000.000 | | | | | Rp - | | | | | #VALUE! | | | | 0 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD | | | 2.000.000 | | | | | Rp - | | | | | #VALUE! | | | | 0 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 57.400.000 | | | | | 43.540.900 | | | | | 75,86 | | | | 75,855 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 197.871.000 | | | | | 171.681.158 | | | | | 86,76 | | | | 86,764 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 46.504.132.000 | | | | | 39.797.644.462 | | | | | 85,58 | | | | 85,579 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 45.304.428.000 | | | | | 38.766.305.837 | | | | | 85,57 | | | | 85,568 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 876.259.000 | | | | | 744.595.500 | | | | | 84,97 | | | | 84,974 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 15.250.000 | | | | | 13.837.000 | | | | | 90,73 | | | | 90,734 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 276.500.000 | | | | | 248.173.575 | | | | | 89,76 | | | | 89,755 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 24.095.000 | | | | | 21.990.950 | | | | | 91,27 | | | | 91,268 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 4.000.000 | | | | | 1.749.600 | | | | | 43,74 | | | | 43,74 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | | | 3.000.000 | | | | | 901.000 | | | | | 30,03 | | | | 30,033 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 600.000 | | | | | 91.000 | | | | | 15,17 | | | | 15,167 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|----------------------|------|------|--------------------|------|---------------|------|------|---|------|--------|------|------|-----------------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 368.952.000 | | | | | 325.356.083 | | | | | 88,18 | | | | 88,184 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 174.220.000 | | | | | 140.852.000 | | | | | 80,85 | | | | 80,847 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 53.716.000 | | | | | 47.160.800 | | | | | 87,80 | | | | 87,797 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 141.016.000 | | | | | 137.343.283 | | | | | 97,40 | | | | 97,396 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.619.696.000 | | | | | 2.543.386.782 | | | | | 97,09 | | | | 97,087 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 3.700.000 | | | | | 3.354.450 | | | | | 90,66 | | | | 90,661 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | 14.000.000 | | | | | 13.838.000 | | | | | 98,84 | | | | 98,843 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 2.559.016.000 | | | | | 2.490.500.333 | | | | | 97,32 | | | | 97,323 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 9.480.000 | | | | | 9.480.000 | | | | | 100,00 | | | | 100 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 3.700.000 | | | | | 3.588.000 | | | | | 96,97 | | | | 96,973 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 29.800.000 | | | | | 22.625.999 | | | | | 75,93 | | | | 75,926 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 466.806.000 | | | | | 429.687.864 | | | | | 92,05 | | | | 92,048 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 19.000.000 | | | | | 17.424.000 | | | | | 91,71 | | | | 91,705 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 53.700.000 | | | | | 48.891.500 | | | | | 91,05 | | | | 91,046 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 20.000.000 | | | | | 17.600.000 | | | | | 88,00 | | | | 88 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 30.954.500 | | | | | 29.847.000 | | | | | 96,42 | | | | 96,422 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 67.761.500 | | | | | 65.805.550 | | | | | 97,11 | | | | 97,113 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 9.240.000 | | | | | 9.104.020 | | | | | 98,53 | | | | 98,528 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 251.942.000 | | | | | 229.573.727 | | | | | 91,12 | | | | 91,122 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 4.900.000 | | | | | 4.265.750 | | | | | 87,06 | | | | 87,056 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 9.308.000 | | | | | 7.176.317 | | | | | 77,10 | | | | 77,098 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------|---------------|----------------|----------------|---|------|-------|------|--------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 179.750.000 | | | | | 177.836.450 | | | | | 98,94 | | | | 98,935 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 179.750.000 | | | | | 177.836.450 | | | | | 98,94 | | | | 98,935 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.214.951.700 | | | | | 9.776.394.213 | | | | | 95,71 | | | | 95,707 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 13.000.000 | | | | | 4.777.500 | | | | | 36,75 | | | | 36,75 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.561.000.000 | | | | | 1.345.740.524 | | | | | 86,21 | | | | 86,21 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 8.640.951.700 | | | | | 8.425.876.189 | | | | | 97,51 | | | | 97,511 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 235.500.000 | | | | | 207.660.675 | | | | | 88,18 | | | | 88,179 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 31.500.000 | | | | | 15.742.000 | | | | | 49,97 | | | | 49,975 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 204.000.000 | | | | | 191.918.675 | | | | | 94,08 | | | | 94,078 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 61.602.392.562 | 63.981.847.378 | | | | 58.055.049.292 | 59.322.998.189 | | | 94 | 93 | 3,86 | 93 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.458.854.588 | 1.051.397.500 | | | | 1.332.680.134 | 1.002.384.330 | | | 91 | 95 | -27,93 | 93 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.215.561.370 | 860.032.800 | | | | 1.126.251.494 | 825.264.647 | | | 93 | 96 | -29,25 | 94 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | | 24.910.000 | 5.264.700 | | | | 9.463.000 | 3.988.000 | | | 38 | 76 | -78,87 | 57 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | | | | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | 2.937.500 | 3.240.000 | | | 84 | 93 | 0,00 | 88 | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | 884.000 | 3.405.000 | | | 22 | 85 | 0,00 | 54 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | 1.676.000 | 1.200.000 | | | 84 | 60 | 0,00 | 72 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 67.370.000 | 60.000.000 | | | | 65.722.685 | 53.424.685 | | | 98 | 89 | -10,94 | 93 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 141.513.218 | 116.600.000 | | | | 125.745.455 | 111.861.998 | | | 89 | 96 | -17,60 | 92 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 44.386.229.000 | 46.362.387.000 | | | | 41.745.797.312 | 42.170.291.571 | | | 94 | 91 | 4,45 | 93 | |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|------|----------------|----------------|--------------------|------|------|----------------|----------------|---|------|------|------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 43.090.915.000 | 45.231.408.000 | | | | 40.541.545.285 | 41.102.027.184 | | | | 94 | 91 | 4,97 | 92 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 967.000.000 | | | | | 897.918.424 | | | | | 93 | #DIV/0! | -100,00 | #DIV/0! |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 16.000.000 | 16.000.000 | | | | 15.270.000 | 15.453.752 | | | | 95 | 97 | 0,00 | 96 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 280.314.000 | 180.314.000 | | | | 265.804.563 | 177.855.525 | | | | 95 | 99 | -35,67 | 97 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 24.000.000 | 24.000.000 | | | | 19.093.930 | 23.036.480 | | | | 80 | 96 | 0,00 | 88 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | 3.609.860 | 3.400.000 | | | | 90 | 85 | 0,00 | 88 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | 1.807.000 | 2.174.500 | | | | 60 | 72 | 0,00 | 66 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | 748.250 | 600.000 | | | | 75 | 60 | 0,00 | 67 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 277.000.000 | 238.344.200 | | | | 268.618.700 | 220.649.094 | | | | 97 | 93 | -13,96 | 95 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 115.000.000 | 113.000.000 | | | | 107.932.000 | 102.815.000 | | | | 94 | 91 | -1,74 | 92 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 48.000.000 | 36.544.200 | | | | 47.825.900 | 32.634.094 | | | | 100 | 89 | -23,87 | 94 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 114.000.000 | 88.800.000 | | | | 112.860.800 | 85.200.000 | | | | 99 | 96 | -22,11 | 97 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 3.014.995.300 | 3.038.072.000 | | | | 2.906.212.577 | 2.947.650.813 | | | | 96 | 97 | 0,77 | 97 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 3.700.000 | 3.700.000 | | | | 3.499.900 | 3.523.500 | | | | 95 | 95 | 0,00 | 95 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 66.760.300 | 9.702.000 | | | | 59.070.000 | 9.690.300 | | | | 88 | 100 | -85,47 | 94 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 2.768.335.000 | 2.968.840.000 | | | | 2.681.486.827 | 2.883.720.018 | | | | 97 | 97 | 7,24 | 97 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 75.000.000 | 18.500.000 | | | | 73.961.850 | 18.100.900 | | | | 99 | 98 | -75,33 | 98 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 3.700.000 | 3.000.000 | | | | 3.700.000 | 3.000.000 | | | | 100 | 100 | -18,92 | 100 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|------|----------------|----------------|--------------------|------|------|---------------|----------------|---|------|------|------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 97.500.000 | 34.330.000 | | | | 84.494.000 | 29.616.095 | | | | 87 | 86 | -64,79 | 86 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 528.500.955 | 2.440.436.778 | | | | 493.184.451 | 2.378.392.954 | | | | 93 | 97 | 361,77 | 95 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 19.037.080 | 21.250.000 | | | | 17.417.010 | 19.882.320 | | | | 91 | 94 | 11,62 | 93 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 87.671.000 | 2.058.361.778 | | | | 83.671.230 | 2.007.383.130 | | | | 95 | 98 | 2247,83 | 96 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.100.000 | 16.500.000 | | | | 17.496.360 | 14.491.000 | | | | 97 | 88 | -8,84 | 92 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 28.000.000 | | | | | 24.925.222 | | | | | 89 | #DIV/0! | -100,00 | #DIV/0! |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 66.012.875 | 64.375.000 | | | | 53.602.000 | 61.499.994 | | | | 81 | 96 | -2,48 | 88 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 10.880.000 | 13.800.000 | | | | 10.874.380 | 13.778.000 | | | | 100 | 100 | 26,84 | 100 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 281.800.000 | | | | | 278.245.749 | | | | | 99 | #DIV/0! | -100,00 | #DIV/0! |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.000.000 | 4.500.000 | | | | 2.005.000 | 3.616.900 | | | | 20 | 80 | -55,00 | 50 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 7.000.000 | | | | | 4.947.500 | | | | | 71 | #DIV/0! | -100,00 | #DIV/0! |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1.178.368.000 | 94.500.000 | | | | 1.004.410.000 | 90.230.000 | | | | 85 | 95 | -91,98 | 90 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.178.368.000 | 94.500.000 | | | | 1.004.410.000 | 90.230.000 | | | | 85 | 95 | -91,98 | 90 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 10.135.003.074 | 10.430.059.900 | | | | 9.797.139.335 | 10.214.778.481 | | | | 97 | 98 | 2,91 | 97 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | | | | 4.277.000 | 4.250.000 | | | | 71 | 71 | 0,00 | 71 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.463.290.578 | 1.744.989.000 | | | | 1.437.428.921 | 1.734.480.611 | | | | 98 | 99 | 19,25 | 99 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | 894.200 | - | | | | 89 | - | 0,00 | 45 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 8.664.712.496 | 8.678.070.900 | | | | 8.354.539.214 | 8.476.047.870 | | | | 96 | 98 | 0,15 | 97 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 623.441.645 | 326.650.000 | | | | 507.006.783 | 298.620.946 | | | | 81 | 91 | -47,61 | 86 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|------|----------------|----------------|--------------------|------|------|----------------|----------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 253.710.000 | 272.000.000 | | | | 232.157.436 | 252.127.591 | | | | 92 | 93 | 7,21 | 92 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 369.731.645 | 54.650.000 | | | | 274.849.347 | 46.493.355 | | | | 74 | 85 | -85,22 | 80 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 13.695.290.438 | 36.786.726.100 | | | | 12.717.389.420 | 27.314.465.978 | | | | 93 | 74 | 168,61 | 84 |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | | 200.000.000 | 50.000.000 | | | | 191.728.646 | 47.815.550 | | | | 96 | 96 | -75,00 | 96 |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 200.000.000 | 50.000.000 | | | | 191.728.646 | 47.815.550 | | | | 96 | 96 | -75,00 | 96 |
| Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 4.014.660.000 | 30.730.877.000 | | | | 3.553.296.587 | 21.454.772.729 | | | | 89 | 70 | 665,47 | 79 |
| Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 3.464.660.000 | 30.391.677.000 | | | | 3.027.951.423 | 21.121.682.835 | | | | 87 | 69 | 777,19 | 78 |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 500.000.000 | 289.200.000 | | | | 484.921.427 | 287.488.589 | | | | 97 | 99 | -42,16 | 98 |
| Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | 40.423.737 | 45.601.305 | | | | 81 | 91 | 0,00 | 86 |
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 8.880.630.438 | 5.716.209.100 | | | | 8.421.247.398 | 5.528.738.873 | | | | 95 | 97 | -35,63 | 96 |
| Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | | 6.837.912.504 | 4.807.969.100 | | | | 6.477.950.582 | 4.693.993.435 | | | | 95 | 98 | -29,69 | 96 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------|------|------|---------------|----------------|--------------------|------|------|---------------|----------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | | | | 1.162.630.000 | 758.240.000 | | | | 1.131.410.411 | 717.293.438 | | | | 97 | 95 | -34,78 | 96 |
| Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | | 880.087.934 | 150.000.000 | | | | 811.886.405 | 117.452.000 | | | | 92 | 78 | -82,96 | 85 |
| Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | | | | 600.000.000 | 289.640.000 | | | | 551.116.789 | 283.138.826 | | | | 92 | 98 | -51,73 | 95 |
| Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | 150.000.000 | 74.000.000 | | | | 122.368.697 | 71.094.688 | | | | 82 | 96 | -50,67 | 89 |
| Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | | 450.000.000 | 215.640.000 | | | | 428.748.092 | 212.044.138 | | | | 95 | 98 | -52,08 | 97 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 536.300.000 | 8.278.000.000 | | | | 517.834.585 | 7.941.524.333 | | | | 97 | 96 | 1443,54 | 96 |
| Penataan Prasarana Pertanian | | | | 100.000.000 | 8.128.000.000 | | | | 91.221.900 | 7.793.584.403 | | | | 91 | 96 | 8028,00 | 94 |
| Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | 49.116.000 | 46.717.316 | | | | 98 | 93 | 0,00 | 96 |
| Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | 42.105.900 | 49.199.000 | | | | 84 | 98 | 0,00 | 91 |
| Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 436.300.000 | 150.000.000 | | | | 426.612.685 | 147.939.930 | | | | 98 | 99 | -65,62 | 98 |
| Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | | 364.300.000 | 75.000.000 | | | | 355.973.535 | 74.466.077 | | | | 98 | 99 | -79,41 | 99 |
| Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | | 72.000.000 | 75.000.000 | | | | 70.639.150 | 73.473.853 | | | | 98 | 98 | 4,17 | 98 |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 6.050.000.000 | 11.541.674.800 | | | | 5.895.214.621 | 10.542.289.198 | | | | 97 | 91 | 90,77 | 94 |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 1.600.000.000 | 8.544.863.600 | | | | 1.529.331.340 | 7.627.763.332 | | | | 96 | 89 | 434,05 | 92 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|------|---------------|---------------|--------------------|------|------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | | | | 500.000.000 | 252.800.000 | | | | 495.585.602 | 164.551.412 | | | | 99 | 65 | -49,44 | 82 |
| Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 450.000.000 | 7.537.863.600 | | | | 421.929.025 | 6.743.252.872 | | | | 94 | 89 | 1575,08 | 92 |
| Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | 650.000.000 | 754.200.000 | | | | 611.816.713 | 719.959.048 | | | | 94 | 95 | 16,03 | 95 |
| Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | | | | 1.425.000.000 | 1.111.211.200 | | | | 1.407.241.049 | 1.069.933.917 | | | | 99 | 96 | -22,02 | 98 |
| Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | | | | 230.000.000 | 130.000.000 | | | | 227.758.358 | 128.944.200 | | | | 99 | 99 | -43,48 | 99 |
| Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | | | | 595.000.000 | 387.600.000 | | | | 583.174.999 | 373.626.368 | | | | 98 | 96 | -34,86 | 97 |
| Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi | | | | 600.000.000 | 593.611.200 | | | | 596.307.692 | 567.363.349 | | | | 99 | 96 | -1,06 | 97 |
| Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | | 1.750.000.000 | 1.266.400.000 | | | | 1.710.193.730 | 1.235.103.551 | | | | 98 | 98 | -27,63 | 98 |
| Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | | | | 500.000.000 | 300.000.000 | | | | 497.502.065 | 290.630.113 | | | | 100 | 97 | -40,00 | 98 |
| Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | | | | 150.000.000 | 101.400.000 | | | | 146.579.100 | 100.070.175 | | | | 98 | 99 | -32,40 | 98 |
| Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 1.100.000.000 | 865.000.000 | | | | 1.066.112.565 | 844.403.263 | | | | 97 | 98 | -21,36 | 97 |
| Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 350.000.000 | 100.000.000 | | | | 347.549.388 | 95.078.400 | | | | 99 | 95 | -71,43 | 97 |
| Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan | | | | 350.000.000 | 100.000.000 | | | | 347.549.388 | 95.078.400 | | | | 99 | 95 | -71,43 | 97 |
| Kesejahteraan Hewan | | | | 925.000.000 | 519.200.000 | | | | 900.899.114 | 514.409.998 | | | | 97 | 99 | -43,87 | 98 |

| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------|------|------|----------------|----------------|--------------------|------|------|----------------|----------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | | | | 400.000.000 | 116.400.000 | | | | 384.422.330 | 114.742.337 | | | | 96 | 99 | -70,90 | 97 |
| Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya | | | | 525.000.000 | 402.800.000 | | | | 516.476.784 | 399.667.661 | | | | 98 | 99 | -23,28 | 99 |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | 900.000.000 | 317.700.000 | | | | 887.585.460 | 312.231.414 | | | | 99 | 98 | -64,70 | 98 |
| Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 900.000.000 | 317.700.000 | | | | 887.585.460 | 312.231.414 | | | | 99 | 98 | -64,70 | 98 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | | | | 900.000.000 | 317.700.000 | | | | 887.585.460 | 312.231.414 | | | | 99 | 98 | -64,70 | 98 |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 31.240.717.000 | 39.671.207.222 | | | | 23.249.275.347 | 31.580.981.869 | | | | 74 | 80 | 26,99 | 77 |
| Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | 30.540.717.000 | 39.217.167.222 | | | | 22.561.203.712 | 31.131.006.086 | | | | 74 | 79 | 28,41 | 77 |
| Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | 800.000.000 | 1.002.800.000 | | | | 784.594.730 | 995.176.675 | | | | 98 | 99 | 25,35 | 99 |
| Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | 29.740.717.000 | 38.214.367.222 | | | | 21.776.608.982 | 30.135.829.411 | | | | 73 | 79 | 28,49 | 76 |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | 700.000.000 | 454.040.000 | | | | 688.071.635 | 449.975.783 | | | | 98 | 99 | -35,14 | 99 |
| Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | | | | 500.000.000 | 304.040.000 | | | | 494.781.423 | 303.484.525 | | | | 99 | 100 | -39,19 | 99 |
| Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani | | | | 200.000.000 | 150.000.000 | | | | 193.290.212 | 146.491.258 | | | | 97 | 98 | -25,00 | 97 |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan karena berdampak signifikan bagi kinerja Dinas Peternakan. Informasi tersebut disusun dengan nomenklatur berikut.

3.1 Permasalahan pelayanan PD

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur diperlukan dalam rangka pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur 2 (dua) tahun kedepan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

| Masalah Pokok (1) | Masalah (2) | Akar Masalah (3) |
|---|--|--|
| Melambatnya pertumbuhan Sub Kategori Peternakan | Belum Optimalnya produksi dan produktivitas peternakan | <ul style="list-style-type: none">• Belum Optimalnya Kualitas SDM Peternakan• Belum Optimalnya Teknologi Peternakan• Belum Optimalnya Kualitas Bibit Ternak• Banyaknya kejadian PHMS• Belum Optimalnya Penggunaan Bahan Pakan Lokal• Belum Optimalnya peternakan rakyat yang terakses informasi, teknologi dan permodalan• Rendahnya jumlah SDM Peternakan dan Kesehatan Hewan dibandingkan dengan kebutuhan di Jawa Timur• Rendahnya efisiensi reproduksi (<i>calving interval</i>, <i>S/C</i>, <i>Days Open</i>, gangguan reproduksi, dan <i>silent heat</i> pada ternak ruminansia)• Tidak tercapainya <i>peak production</i> (HH dan HD pada unggas)• Rendahnya kuantitas dan kualitas susu harian ditingkat peternak |
| | Belum Optimalnya Daya Saing Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak | <ul style="list-style-type: none">• Rendahnya mutu produk peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan• Belum Optimalnya akses pasar Produk Peternakan• Rendahnya tingkat konsumsi Daging• Belum Optimalnya teknologi kemasan produk hasil peternakan |

| | | |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya pengolahan dan pemasaran produk olahan peternakan terakses informasi, teknologi dan permodalan • Rendahnya SDM bidang peternakan • Tingginya persaingan produk lokal dan impor dari segi harga dan kualitas. • Rendahnya daya saing produk peternakan di pasar internasional. • Rendahnya diversifikasi produk asal ternak yang bernilai tambah dari usaha peternakan rakyat • Tingginya angka impor susu skim dan produk olahan susu |
| | Belum Optimalnya Produksi Bibit komoditas peternakan Unggul | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya jumlah bibit dan pakan yang dihasilkan • Rendahnya kompetensi SDM Peternakan dan Kesehatan Hewan • Rendahnya mutu genetik ternak • Terbatasnya jumlah kawasan pembibitan |
| | Kurangnya Sarana dan Prasarana Peternakan | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan ternak seperti: poskeswan, Rumah potong hewan (RPH) dan Laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) • Rendahnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana produksi ternak • Kurangnya SDM bidang peternakan di Kabupaten/Kota |
| | Belum Optimalnya penggunaan pakan ternak lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak • Mahalnya harga pakan ternak • Tingginya ketergantungan impor bahan baku pakan unggas • Kurangnya pengetahuan peternak rakyat terhadap ilmu pembuatan ransum pakan ternak |

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis masalah pokok, masalah dan akar masalah, keterkaitan antara permasalahan dengan isu strategis dapat dijelaskan pada table berikut :

Table 3.2.1
Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis

| 5 Permasalahan | Isu Strategis |
|--|--|
| Belum Optimalnya produksi dan produktivitas peternakan | Meningkatnya pertumbuhan produksi peternakan |
| Belum Optimalnya Daya Saing Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak | Meningkatnya pertumbuhan produk olahan bermutu dan berdaya saing |

| | |
|---|---|
| Belum Optimalnya Produksi Bibit komoditas peternakan Unggul | Meningkatkannya kualitas Bibit komoditas peternakan |
| Kurangnya Sarana dan Prasarana Peternakan | Meningkatnya sarana dan prasarana peternakan |
| Belum Optimalnya penggunaan pakan ternak lokal | Meningkatnya menggunakan pakan lokal |
| | |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan, dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta indikator kerjanya mengacu pada RPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Pemerintahan daerah memainkan peran krusial dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan ini secara efektif, perangkat daerah perlu merumuskan rencana strategis yang jelas dan terarah. Pentingnya tujuan dan sasaran dalam rencana strategis perangkat daerah tak dapat diabaikan, karena menjadi panduan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program-program pemerintah. Tujuan dan sasaran membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Dengan menetapkan sasaran yang terukur dan spesifik, perangkat daerah dapat mengidentifikasi prioritas dan alokasi anggaran yang sesuai. Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Target Kinerja | |
|---|---|---|----------------|------|
| | | | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan | | Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan (PDRB ADHK) | 1,3 | 1,3 |
| | Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan | Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan (%) | 2,69 | 2,79 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP | 85 | 85 |

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading Kinerja strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 4.4 dibawah ini :

Table 4.4 cascading Kinerja PD

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|----------------|----------------|
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan | Persentase Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan (PDRB ADHK) | Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan | Persentase peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan (PDRB ADHB) | Meningkatnya produksi daging telur dan susu | Persentase peningkatan produksi daging Persentase peningkatan produksi susu Persentase peningkatan produksi telur | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | tersusunnya Laporan pengelolaan sumber daya Genetik (SDG) Hewan | Jumlah Laporan pengelolaan sumber daya Genetik (SDG) Hewan | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Terlaksananya penilaian rumpun SDG hewan | Jumlah rumpun SDG hewan yang dinilai | Penilaian rumpun SDG Hewan | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | 70.000.000 | 70.000.000 |
| | | | | | | | | tersusunnya laporan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah laporan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | terlaksananya pengembangan kapasitas Petugas Ternak dan Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner dan Medik Veteriner | Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 57.002.828.499 | 57.002.828.499 |
| | | | | | | | | Tersusunnya laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman | Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | 350.000.000 | 350.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | |
| | | | | | | | | | | | tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 4.750.000.000 | 4.750.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya pemantauan Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar | Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | 950.000.000 | 950.000.000 |
| | | | | | | | | tersusunnya laporan pengawasan peredaran obat hewan | Jumlah laporan peredaran obat hewan | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | terlaksananya Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan | Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | | | | Meningkatnya populasi ternak di wilayah sumber bibit | Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Tersusunnya Laporan pembangunan / pemeliharaan yang dilakukan | Jumlah Laporan pembangunan / pemeliharaan yang dilakukan | Penataan Prasarana Pertanian | Terlaksananya pemeliharaan Laboratorium Pertanian | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya pemeliharaan Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 |
| | | | | | | | | | | | terlaksananya Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya pengendalian prasarana pascapanen peternakan | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | 550.000.000 | 550.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | Terlaksannay Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | 300.000.000 | 300.000.000 |
| | | | | | | | | tersusunnya laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya pelestarian Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | Meningkatknya a Jumlah wilayah terkendali PHMS di Jawa Timur Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH | Persentase peningkatan wilayah terkendali PHMS Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | tersusunnya laporan bimbingan zoonosis kepada masyarakat tersusunnya laporan pengendalian PHMS | Jumlah laporan bimbingan zoonosis kepada masyarakat Jumlah laporan pengendalian PHMS | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terkendalinya Daerah Terdampak Wabah | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 600.000.000 | 500.000.000 |
| | | | | | | | | | | | terlaksananya surveilans dan zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | 90.000.000 | 45.000.000 |
| | | | | | | | | | | | terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | 150.000.000 | 130.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---|---|--|--|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | terlaksananya manajemen risiko zoonosis | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 75.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | 50.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | | | | Tersusunnya laporan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan | Jumlah laporan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM | 450.000.000 | 400.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | 160.000.000 | 140.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengawasan Peredaran Produk Hewan | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | Pengawasan Peredaran Produk Hewan | 35.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 130.000.000 | 125.000.000 |
| | | | | | | | | tersusunnya Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas | Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Terlaksananya Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | 200.000.000 | 170.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---|--|---|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | 75.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1.330.000.000 | 1.330.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan | Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi | Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | 150.000.000 | 150.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | | | Tersusunnya sertifikasi persyaratan teknis yang | Jumlah sertifikasi persyaratan teknis yang diterbitkan | Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan | 100.000.000 | 100.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|--|--|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | | diterbitkan | | Veteriner | Kesehatan Hewan, Kesehatan | dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan | | |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 150.000.000 | 130.000.000 |
| | | | | | | | | tersusunnya laporan kesejahteraan Hewan | Jumlah laporan kesejahteraan Hewan | Kesejahteraan Hewan | Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan | Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya | 175.000.000 | 150.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 150.000.000 | 125.000.000 |
| | | | | | Meningkatnya izin usaha obat hewan yang diawasi | Persentase peningkatan pengawasan izin usaha obat hewan | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Tersusunnya laporan penerbitan izin usaha pegecer obat hewan | jumlah laporan penerbitan izin usaha pegecer obat hewan | Penerbitan Izin Usaha Pegecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pegecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pegecer Obat Hewan | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pegecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pegecer Obat Hewan | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | | | | Meningkatnya pelaku usaha agribisnis peternakan | Persentase peningkatan pelaku usaha agribisnis peternakan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | tersusunnya Laporan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian | Jumlah Laporan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 600.000.000 | 600.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 12.700.000.000 | 11.700.000.000 |
| | | | | | | | | tersusunnya Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis | Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Terlaksananya Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | Jumlah korporasi petani yang didampingi | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | 200.000.000 | 200.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|---|---|---|-----------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|--|---|---|---|----------------|----------------|
| | Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan | Persentase Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan (PDRB ADHK) | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi implementasi SAKIP | Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Meningkatnya Indikator Program yang tercapai Meningkatnya Realisasi Anggaran | Indeks Profesionalitas ASN Persentase Indikator Program yang tercapai Persentase Realisasi Anggaran | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang dibuat | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 700.000.000 | 700.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 150.000.000 | 150.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 400.000.000 | 400.000.000 |
| | | | | | | | | Tersusunnya dokumen | jumlah dokumen Administrasi | Administrasi Keuangan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 46.145.251.000 | 46.145.251.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--|---|--|---|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat | Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat | Perangkat Daerah | ASN | Tunjangan ASN | | | |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 24.000.000 | 24.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | | | Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dibuat | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dibuat | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 113.500.000 | 113.500.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.000.000 | 28.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya | Jumlah Dokumen | Pemanfaatan Barang | 90.600.000 | 90.600.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--|---|---|---|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Milik Daerah SKPD | | |
| | | | | | | | | tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | - |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2.979.900.000 | 2.979.900.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 27.000.000 | 27.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 33.500.000 | 33.500.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.070.000 | 42.070.000 |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 80.000.000 | 80.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terfasilitasinya | Jumlah Laporan | Fasilitasi Kunjungan | 17.000.000 | 17.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--|---|---|---|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | kunjungan tamu | Fasilitas Kunjungan Tamu | Tamu | | |
| | | | | | | | | | | | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 101.800.000 | 101.800.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | | | Tersusunnya ketersediaan jasa penunjang kantor yang terpenuhi | laporan ketersediaan jasa penunjang kantor yang terpenuhi | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | | | | | | | | tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.663.542.090 | 2.663.542.090 |
| | | | | | | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8.393.836.910 | 8.393.836.910 |
| | | | | | | | | tersusunnya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 400.000.000 | 347.441.500 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Pemeliharaan Mebel | 200.000.000 | - |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung | 100.000.000 | 100.000.000 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Outcome | Indikator Program | Program | Output | Indikator Kegiatan | Kegiatan | Sub Output | Indikator Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | 2025 | 2026 |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|--------------------|----------|---|---|-------------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan adalah strategi dan kebijakan Dinas Peternakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan bagi setiap program RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| 1 Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan | 1 Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan | 1 Meningkatkan pertumbuhan produktivitas serta nilai tambah komoditas dan produk peternakan | 1 Meningkatkan penerapan good farming practice peternakan |
| | | | 2 Meningkatkan nilai tambah produk hasil ternak yang dihasilkan oleh usaha peternakan rakyat |
| | | | 3 Meningkatkan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan |
| | 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah | 1 Mendorong keselarasan antara kelembagaan, Kinerja, Perencanaan dan Anggaran | 1 Menyelaraskan dokumen perencanaan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Peternakan merupakan program yang tercantum dalam RPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Program pembangunan peternakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdiri dari program prioritas dan program pendukung. Program prioritas sebagai program unggulan yang diharapkan dapat berkontribusi besar pada meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan yang terdiri dari 6 (enam) program yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel 6.1 ; 6.2 dan 6.3 dibawah ini :

Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta Indikator Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sesuai dengan

Bab VII RPD

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | LOKASI |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | |
| Tujuan Dinas | Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan | Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan (PDRB ADHK) | | % | 1,3 | 157.972.828.499 | 1,3 | 150.287.105.540 | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase peningkatan produksi telur Persentase peningkatan produksi daging Persentase peningkatan produksi susu | 2,2 2,5 2 | Persen | 1,8% 1,5% 0,5% | 63.922.828.499 | 1,8% 1,5% 0,5% | 58.221.764.040 | Jawa Timur |
| <i>3.27.02.1.03</i> | <i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</i> | <i>Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan</i> | <i>1</i> | <i>Laporan</i> | <i>1</i> | <i>120.000.000</i> | <i>1</i> | <i>120.000.000</i> | <i>Jawa Timur</i> |
| 3.27.02.1.03.0003 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | 7 | Laporan | 7 | 70.000.000 | 7 | 70.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.03.0005 | Penilaian rumpun SDG Hewan | Jumlah rumpun SDG hewan yang dinilai | 1 | Rumpun | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| <i>3.27.02.1.04</i> | <i>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i> | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i> | <i>3</i> | <i>Laporan</i> | <i>1</i> | <i>57.452.828.499</i> | <i>1</i> | <i>51.751.764.040</i> | <i>Jawa Timur</i> |
| 3.27.02.1.04.0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | Dokumen | 10 | 57.002.828.499 | 10 | 51.301.764.040 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | LOKASI | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | | Rp |
| 3.27.02.1.04.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | laporan | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.04.0005 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner | Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | | Orang | 6 | 100.000.000 | 6 | 100.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.05 | <i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</i> | <i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</i> | 3 | <i>Laporan</i> | <i>1</i> | <i>6.050.000.000</i> | <i>1</i> | <i>6.050.000.000</i> | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.05.0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat | | Laporan | 8 | 350.000.000 | 8 | 350.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.05.0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi | | laporan | 36 | 4.750.000.000 | 36 | 4.750.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.05.0005 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar | | Dokumen | 4 | 950.000.000 | 4 | 950.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.06 | <i>Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</i> | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</i> | 2 | <i>Laporan</i> | <i>1</i> | <i>300.000.000</i> | <i>1</i> | <i>300.000.000</i> | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.06.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.02.1.06.0002 | Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan | | Kasus | 8 | 200.000.000 | 8 | 200.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | LOKASI | |
|------------------------------------|---|--|---------------------|--|--------|---------------|--------|---------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | | Rp |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit | 3 | % | 1 | 5.000.000.000 | 1 | 5.000.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | Jumlah Laporan Pembangunan/pemeliharaan yang dilakukan | 2 | laporan | 3 | 4.900.000.000 | 3 | 4.900.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.01.0007 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara | | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.01.0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | | Unit | 8 | 1.800.000.000 | 8 | 1.800.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.01.0012 | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet | | Unit | 4 | 1.400.000.000 | 4 | 1.400.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.01.0019 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | Jumlah Prasarana Pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | | unit | 1 | 550.000.000 | 1 | 550.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.01.0021 | Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | | Unit | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.01.0024 | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | | Unit | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | LOKASI |
|------------------------------------|---|---|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | |
| 3.27.03.1.02 | <i>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i> | <i>Jumlah Laporan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak</i> | 2 | <i>laporan</i> | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.02.0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | | Laporan | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.03.1.02.0002 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | Laporan | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1. Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH 2. Persentase peningkatan wilayah terkendali PHMS | 5% 10% | % | 1.5% 2.10% | 4.500.000.000 | 1.5% 2.15% | 4.000.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.01 | <i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i> | <i>Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i> | 1 | <i>Laporan</i> | 2 | 1.240.000.000 | 2 | 1.005.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | | Laporan | 5 | 600.000.000 | 7 | 500.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.01.0004 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | | Wilayah | 38 | 90.000.000 | 38 | 45.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | LOKASI | |
|------------------------------------|---|---|---------------------|--|----------|---------------------------|----------|---------------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | | Rp |
| 3.27.04.1.01.0005 | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan | | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 130.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.01.0006 | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis | | Dokumen | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.01.0007 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Laporan | 5 | 75.000.000 | 7 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.01.0008 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | Kasus | 12 | 50.000.000 | 12 | 30.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.01.0009 | Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | Jumlah kader <i>zoonosis</i> | | Orang | 38 | 75.000.000 | 38 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.02 | <i>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</i> | <i>Jumlah Laporan Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan</i> | 2 | <i>Laporan</i> | 2 | <i>775.000.000</i> | 2 | <i>685.000.000</i> | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.02.0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | | Laporan | 24 | 450.000.000 | 24 | 400.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.02.0005 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | Laporan | 3 | 160.000.000 | 3 | 140.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.02.0006 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | | Laporan | 4 | 35.000.000 | 4 | 20.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | LOKASI | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|--|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | | Rp |
| 3.27.04.1.02.0007 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | | Laporan | 24 | 130.000.000 | 24 | 125.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03 | <i>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</i> | <i>Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</i> | 3 | <i>Laporan</i> | 2 | <i>1.910.000.000</i> | 2 | <i>1.855.000.000</i> | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03.0001 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi | | Unit | 5 | 200.000.000 | 5 | 170.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03.0002 | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner | | Laporan | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03.0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | Dokumen | 2950 | 1.330.000.000 | 3220 | 1.330.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03.0004 | Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan | | Unit Usaha | 53 | 35.000.000 | 53 | 35.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | | Unit Usaha | 50 | 150.000.000 | 50 | 150.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03.0006 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik | | Unit Usaha | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | LOKASI |
|------------------------------------|---|--|---------------------|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | |
| 3.27.04.1.03.0007 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan | | Orang | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.03.0008 | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan | | Produk | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.04 | Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Laporan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 50 | Laporan | 2 | 250.000.000 | 2 | 180.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.04.0003 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM | | Dokumen | 1750 | 150.000.000 | 1750 | 130.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.04.0004 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | | Orang | 200 | 100.000.000 | 200 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.05 | Kesejahteraan Hewan | Jumlah Laporan Kesejahteraan Hewan | 2 | Laporan | 1 | 325.000.000 | 1 | 275.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.05.0002 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya | Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani | | Kasus | 2 | 175.000.000 | 2 | 150.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.04.1.05.0003 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | | Sertifikat | 50 | 150.000.000 | 50 | 125.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase peningkatan pegawai Izin Usaha Obat Hewan | 0 | % | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | LOKASI | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | | Rp |
| 3.27.06.1.03 | <i>Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan</i> | <i>Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan</i> | 1 | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.06.1.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen | | Laporan | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.06.1.03.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi | | Laporan | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan pelaku usaha agribisnis peternakan | 5 | % | 5 | 13.500.000.000 | 5 | 12.500.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.07.1.02 | <i>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i> | <i>Jumlah Laporan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i> | 2 | Laporan | 2 | 13.300.000.000 | 2 | 12.300.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | Dokumen | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | | Kelompok | 20 | 12.700.000.000 | 20 | 11.700.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.07.1.03 | <i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i> | <i>Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i> | 2 | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | Jawa Timur |
| 3.27.07.1.03.0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani | Jumlah korporasi petani yang didampingi | | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Persentase Indikator Program yang tercapai 3. Persentase Realisasi Anggaran | 85 94 95 | Indeks % % | 85 94 95 | 71.000.000.000 | 85 94 95 | 70.515.341.500 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi tepat waktu</i> | 4 laporan | Laporan | 1 | 970.000.000 | 1 | 970.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | | Dokumen | 2 | 500.000.000 | 3 | 500.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | LOKASI |
|------------------------------------|---|--|---------------------|--|----------|-----------------------|----------|-----------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | |
| X.XX.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Laporan | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.01.0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah data statistic sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah | | Data | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu | 1 | laporan | 1 | 47.543.251.000 | 1 | 47.543.251.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 181 | Orang/Bulan | 232 | 46.145.251.000 | 232 | 46.145.251.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | Dokumen | 1 | 1.150.000.000 | 1 | 1.150.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | LOKASI |
|------------------------------------|--|---|---------------------|--|----------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | |
| X.XX.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Laporan | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | Dokumen | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 | Laporan | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | Dokumen | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan BMD PD dikelola sesuai standar | 1 | laporan | 1 | 232.100.000 | 1 | | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 113.500.000 | 1 | 113.500.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Laporan | 1 | 28.000.000 | 1 | 28.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 90.600.000 | 1 | 90.600.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Dukungan Administrasi Kepegawaian Kantor yang terpenuhi | 1 | laporan | 1 | 6.790.400.000 | 1 | 6.790.400.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | LOKASI | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|--|----------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | | Rp |
| X.XX.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 | Paket | 1 | - | 1 | - | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | Dokumen | 1 | 2.979.900.000 | 1 | 2.979.900.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | Dokumen | 1 | 27.000.000 | 1 | 27.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 | Dokumen | 1 | 3.700.000.000 | 1 | 3.700.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 | Orang | 1 | 33.500.000 | 1 | 33.500.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Orang | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan dukungan administrasi umum kantor yang terpenuhi | 1 | laporan | 1 | 2.900.870.000 | 1 | 2.900.870.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 1 | 42.070.000 | 1 | 42.070.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | Laporan | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | LOKASI |
|------------------------------------|--|--|---------------------|--|----------|-----------------------|----------|-----------------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | |
| X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Laporan | 1 | 101.800.000 | 1 | 101.800.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Jawa Timur |
| <i>X.XX.01.1.07</i> | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Jumlah Laporan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan yang terpenuhi</i> | <i>1</i> | <i>Laporan</i> | <i>1</i> | 600.000.000 | <i>1</i> | 600.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | Jawa Timur |
| <i>X.XX.01.1.08</i> | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Jumlah Laporan ketersediaan jasa penunjang kantor yang terpenuhi</i> | <i>1</i> | <i>Persen</i> | <i>1</i> | <i>11.063.379.000</i> | <i>1</i> | <i>11.063.379.000</i> | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Laporan | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | Laporan | 1 | 2.663.542.090 | 1 | 2.663.542.090 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 1 | 8.393.836.910 | 1 | 8.393.836.910 | Jawa Timur |
| <i>X.XX.01.1.09</i> | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia</i> | <i>1</i> | <i>laporan</i> | <i>1</i> | <i>900.000.000</i> | <i>1</i> | <i>647.441.500</i> | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | 1 | 400.000.000 | 1 | 347.441.500 | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | - | Jawa Timur |
| X.XX.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | Jawa Timur |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KONDISI AWAL (2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | LOKASI | |
|------------------------------------|--|--|---------------------|--|--------|-------------|--------|-------------|------------|
| | | | | SATUAN | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | target | Rp | target | | Rp |
| X.XX.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | Jawa Timur |

Tabel 6.2. Program Ikon Perangkat Daerah

| No | Program Prioritas | Indikator | Target | | Program Nomenklatur | Perangkat Daerah |
|--|--|--|------------|------------|--|------------------|
| | | | 2025 | 2026 | | |
| 1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial | | | | | | |
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan sektor pertanian dalam arti luas | Jumlah Penerima pemberdayaan usaha ekonomi desa | 5 kelompok | 5 kelompok | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Peternakan |
| 6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan | | | | | | |
| 2 | Pengembangan Pusat Agropolitan | Jumlah penerima program upaya Peningkatan Unit Usaha Agribisnis | 2 | 2 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Peternakan |
| 3 | Penguatan SDM Pertanian | Jumlah penerima manfaat Kegiatan Pelatihan, Penyuluhan, Pemberdayaan | 100 | 100 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Peternakan |
| 4 | Program petik olah kemas jual | Jumlah produk yang diinisiasi | 2 | 2 | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Peternakan |
| 5 | Asuransi Petani | Jumlah petani yang mendapatkan manfaat program asuransi petani | 3000 | 3000 | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Peternakan |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Awal | Target | | Kondisi Akhir |
|----|---|---|-------------|--------|------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Tujuan | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan | Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan (PDRB ADHK) | 1,21-2,46 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| II | Sasaran | | | | | |
| | Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan | Persentase peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan (PDRB ADHB) | 2.59 | 2,69 | 2,79 | 2,79 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 84.5 | 85 | 85 | 85 |

Tabel 7.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026

| No | Indikator IKK | Target Awal | Target | | Kondisi Akhir |
|----|---|-------------|--------|------|---------------|
| | | | 2025 | 2026 | |
| I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 15% | 15% | 15% | 15% |

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas peternakan, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Perumusan dan penyusunan perencanaan strategis ini disusun dengan upaya seoptimal mungkin dengan mengacu pada RPD Provinsi Jawa Timur, Renstra Kementerian Pertanian dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergikan pembangunan peternakan khususnya di Jawa Timur. Tugas melaksanakan pembangunan peternakan tersebut bukanlah tugas yang ringan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam renstra ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder yang berkecimpung dalam urusan peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu dengan mempertimbangkan kondisi serta permasalahan maka rencana strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.

Demikian Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 disusun, dengan harapan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan